



VOLUME XI / NO. 103 / APRIL 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

TAX AMNESTY

Kebijakan ekonomi berdimensi luas. Selain menambah penerimaan negara, aturan ini mendorong perekonomian dan terwujudnya postur APBN yang lebih baik. Repatriasi aset menjadi pembuka jalan masuknya modal ke dalam negeri.



Daftar Isi



	5 DARI LAPANGAN BANTENG	LAPORAN UTAMA
	6 EKSPOSUR	13 Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara
	10 LINTAS PERISTIWA	16 Infografis
		18 Memandang Negeri Seberang
		21 Tax Amnesty Perhatikan Asas Keadilan
		23 Meraih Penerimaan melalui Pengampunan
		REPORTASE
		25 Presiden Sampaikan SPT dengan E-Filing
		26 Presiden Resmikan Pusat Logistik Berikat
		WAWANCARA
		27 NTB Serius Garap Wisata Halal
		POTRET KANTOR
		30 Mengawal Kesenambungan Fiskal dengan Infrastruktur

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

FIGUR
32 Sang Pengawal Reformasi
EKONOMI TERKINI
36 Perbaiki Regulasi dan Iklim Investasi
KOLOM EKONOM
40 Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016
GENERASI EMAS
44 Kehidupan yang Riang Bagi Fuji
OPINI
46 Indonesia Dalam Putaran Ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat
REGULASI
48 Pusat Logistik Berikat Tingkatkan Daya Saing Produk Indonesia
INSPIRASI
50 Menemukan Ruang Inovasi di Birokrasi
RENUNGAN
52 Manajemen Diri Melalui Sabar
BUKU
53 Rudy
KULINER
54 Mencicip Sajian Khas RM Surya
SELEBRITI
56 Pilihan Hidup Addie
57 BUNG PISKAL

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



standar pelayanan tamu

tamu dilayani dengan cepat dan waktu yang pasti
tamu dilayani oleh petugas/ konsultan yang berkompeten
setiap tamu terekam dalam Berita Acara Konsultasi
ruang Layanan yang nyaman, aman, dan transparan (dilengkapi CCTV)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Radius Prawiro Lt.3
Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 10710
Telp: 021-3867920, 021-3509452
Fax: 021-3867920, 021-3509452

website.

www.djpk.kemenkeu.go.id

twitter.

@DitjenPK



Dari Lapangan Banteng

Melihat Amnesti dari Berbagai Sisi

Kebijakan *tax amnesty* seyogianya dapat dilihat dengan perspektif yang luas. Pengampunan pajak bukan semata persoalan penerimaan negara, tetapi juga potensi untuk mendorong roda ekonomi. Di tengah kondisi global yang masih lesu, setiap tambahan penerimaan merupakan sumber penggerak perekonomian yang ditunggu.

Pada jangka yang lebih panjang, perluasan basis data Wajib Pajak tentu bisa mendukung terwujudnya postur APBN yang lebih *sustainable*. Ujungnya, penerimaan pajak yang lebih tinggi bisa meningkatkan kapasitas belanja pemerintah, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Yang perlu juga dicatat, *tax amnesty* dapat dimaknai sebagai ajakan pemerintah kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Mari bersama membangun tanah air kita sendiri. Selama ini, masih terdapat dana dan aset WNI yang diparkir di luar negeri. Kebijakan pengampunan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP) dan memberikan kesempatan repatriasi. Investasi yang masuk dari fasilitas itu dapat mendukung stabilitas makroekonomi. Misalnya mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa.

Jika diimplementasikan tahun ini, kebijakan *tax amnesty* dapat menjadi pintu masuk reformasi sistem pajak pada periode mendatang. Bukan hanya administrasi pajak, melainkan juga perbaikan berbagai aturan terkait perpajakan lainnya. Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty* sekali saja. Mengapa hanya sekali dan

mesti di tahun ini? Karena Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau *Automatic Exchange System of Information* (AEOI) antarnegara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki. Konsekuensinya, pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tak bisa dielakkan mulai 2018 nanti.

Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkadang masih menghadapi kesulitan membuka data perbankan WP karena terganjal Undang-Undang (UU) Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tergolong sebagai rahasia bank. Dengan berlakunya sistem pertukaran informasi tadi, jika ditemukan ketidakpatuhan pelaporan aset dan pembayaran pajak dari WP pada 2018, mereka tidak akan mendapatkan pengampunan seperti jika mereka mengajukan amnesti pada tahun ini.

Rancangan UU *Tax Amnesty* yang akan dibahas bersama DPR pun sebetulnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan Pasal 23A mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sebenarnya tak ada alasan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU *Tax Amnesty*. Apalagi bila hal itu didasarkan pada alasan yang kuat dan dilakukan dengan tetap memegang teguh kaidah-kaidah yang berlaku.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Apa pendapat Anda tentang Tax Amnesty? Sampaikan pendapat terbaik Anda dengan tagar #OpiniAnda

Langgeng W Pamungkas @ellwepe
Setuju. Semoga dapat menjangkit wajib pajak baru yang saya kira masih sangat potensial di Indonesia..

Trizar Rizqiawan @trizarrizq
#OpiniAnda Tax Amnesty penting utk menambah kapasitas pembiayaan pembangunan. Setidaknya menambah kapasitas perbankan jgka pnde

Punardiono @punardionosays
mengurangi korupsi atas apbn yg berasal dr penerimaan pajak #taxAmnesty

Pradany Hayyu @hayheyho
Tax Amnesty penting untuk sektor perpajakan Indonesia yang lebih baik

tweet

www.kemenkeu.go.id [Kementerian Keuangan RI](#) [@KemenkeuRI](#) [Kemenkeu RI](#) [kemenkeuri](#)

Cita-Cita Hub Asia Pasifik

Presiden Joko Widodo meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Kamis (10/3) di Cakung, Jakarta. Kehadiran PLB diharapkan mampu menjawab tantangan tingginya biaya logistik nasional yang membuat industri dalam negeri menjadi kurang kompetitif. Pada jangka panjang, PLB diharapkan bisa menjadi hub logistik di Asia Pasifik.

Foto
Muchamad
Ardani



Indah di Mata, Damai di Hati

Ada banyak masjid yang indah dan bersejarah di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya tersebar, mulai dari Makassar hingga Gowa, dari Maros hingga Bulukumba. Perjalanan mengabadikan rumah Tuhan yang begitu mengesankan. Kedua mata menemukan keindahan, mata hati merasakan kedamaian.



01



03



04



02



05

01 Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba.

02 Masjid Agung Takalar.

03 Masjid Agung Jenponto.

04 Masjid Raya Maros.

05 Masjid Agung Syekh Yusuf.

06 Masjid Raya Makassar.

07 Masjid Al-Markaz Al-Islami.

Foto
Fatoni Meindra
D.W.



06



07



Menkeu Lantik Dirjen Pajak

01/03

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro secara resmi melantik Ken Dwiugiasteady sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru pada Selasa (1/3) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Dengan dilantikannya Ken, Menkeu meminta agar Dirjen Pajak yang baru dilantik ini dapat segera menemukan strategi terbaik dalam rangka pengamanan penerimaan perpajakan. Selain itu, ia juga berharap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu bekerja lebih giat untuk mengamankan target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

01/03

Teks Biro KLI

Foto Aditya Arifiyanto

Sesjen Luncurkan Spirit PRIME

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto meluncurkan spirit Sekretariat Jenderal (Setjen) yaitu PRIME yang merupakan turunan dari nilai-nilai serta program budaya Kementerian Keuangan, pada Selasa (01/03) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. PRIME terdiri dari Professional, Responsive, Innovative, Modern dan Enthusiastic. Setjen sebagai salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan, berusaha menjadi Prime Mover untuk mendukung segala tugas dan fungsi organisasi. “Kemenkeu adalah satu institusi yang harus leading di Indonesia. Akan kita tingkatkan di level regional dan internasional,” katanya.



Surat Utang Negara (SUN) Goes To Universitas Jambi

04/03

Teks DJPPR

Foto DJPPR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi (UNJA) menjadi Perguruan Tinggi pertama yang dikunjungi oleh Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR dalam program sosialisasi tahun 2016 pada Jumat (04/03) di Gedung Aula Rektorat Universitas Jambi. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat khususnya akademisi mengenai pengelolaan Surat Utang Negara (SUN). Peserta yang hadir lebih dari 290 orang dari terdiri dari para dosen, mahasiswa FEB UNJA serta para tamu undangan dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di sekitar wilayah Kota Jambi.



Penandatanganan Mou KPKNL Metro dan PT PNM

08/03

Teks DJKN

Foto DJKN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro bersama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabang Bandar Lampung melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 UUHT pada Selasa (8/3) di Bandar Lampung. Acara tersebut dihadiri Kepala KPKNL Metro didampingi Kepala Seksi KPKNL Metro. Sedangkan PT PNM dihadiri oleh Pimpinan Cabang PT PNM Bandar Lampung beserta jajarannya.



Indonesia-Belanda Kerja Sama Pertukaran Informasi Kepabeanan dan Cukai

11/03

Teks DJBC

Foto DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang capacity building dan pertukaran informasi dengan institusi bea dan cukai Belanda, Customs Administration of the Netherlands (CAN). Penandatanganan dilakukan pada Jumat (11/3) di Tax and Customs Museum Rotterdam, Belanda. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Mou ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama dan pertukaran informasi yang telah terjalin baik antara kedua institusi kepabeanan ini.



MPN G2 Bisa Diakses dari New York

14/03

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Modul Penerimaan Negara MPN G-2 kembali mencatatkan kemajuan penerapannya melalui otomasi transaksi setoran penerimaan negara dalam mata uang asing langsung dari luar negeri via sistem elektronik billing MPN G2. Transaksi semacam ini sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui teller Bank. Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryo membuka transaksi perdana setoran penerimaan negara mata uang asing berupa PNPB melalui biller Ditjen Anggaran (DJA) yang dilakukan Bank BRI New York Agency pada Senin (14/03).



Daerah

15/03

Teks DJBC
Foto DJBC

Bea Cukai Bandar Lampung Selamatkan Rp3,7 Miliar Potensi Kerugian Negara

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung berhasil menindak barang ilegal senilai lebih dari Rp7,93 miliar selama periode Oktober 2015 hingga Februari 2016. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp3,7 miliar. Penindakan tersebut dilakukan sebanyak 42 kali. Atas dasar ini pada awal Maret 2016, dilaksanakan Konferensi Pers “Penindakan Miras dan Rokok Ilegal serta Kiriman Pos Internasional” di Aula KPPBC TMP B Bandar Lampung.



Gedung Dwi Warna Jadi Museum Perbendaharaan

22/03

Teks Biro KLI
Foto Tino A.P.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meresmikan Gedung Dwi Warna di Bandung menjadi museum perbendaharaan, pada Selasa (22/03). Gedung yang berfungsi sebagai Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan gedung heritage yang memiliki nilai sejarah panjang pada organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peresmian museum perbendaharaan ini diharapkan dapat menjadi pusat dokumentasi berbagai kebijakan penganggaran, sejak awal terbentuknya Kemenkeu.

- 04 Ulang Tahun BPPK.
- 16/04 Seminar Hukum Keuangan Negara di Jakarta.
- 06/04 Rapat Kerja Pimpinan Tengah Tahun 2016, di Jakarta.
- 06/04 Dirjen Kekayaan Negara Sony Loho mewakili Menteri Keuangan dalam opening speech “State Funding Capability In The Role Of Public Sector In Developing Infrastructure”, di Ritz Carlton Jakarta.
- 05/04 Kepala BKF mendampingi Menteri Keuangan dalam acara Credit Suisse Asian Invesment Conference.
- 12/04 IMF Spring Meeting, di Washington DC, Amerika Serikat.
- 04 Sosialisasi SUKUK Valas.
- 14-15/04 Custom to custom talk, di Australia.
- 07-08/04 Sosialisasi Dana Desa, di Jepara, Demak, Kudus.

Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara

Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak sejak awal tahun. “Nanti keluar *tax amnesty*, berbondong-bondong semuanya. *Eenggak* usah ada yang ragu lagi akan seperti apa,” kata Presiden ketika memberikan sambutan pada peresmian pembukaan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (4/1).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta seluruh perusahaan di Indonesia tidak ragu untuk meminta pengampunan pajak begitu aturan tersebut disahkan. “Kalau sudah keluar, artinya pemerintah memberikan jaminan, Presiden juga memberikan jaminan,” tuturnya. Presiden menyadari bahwa jaminan pemerintah akan menjadi faktor penting keberhasilan implementasi *tax amnesty* di lapangan.

Dalam banyak contoh di berbagai negara, kebijakan *tax amnesty* adalah resep mujarab untuk meningkatkan penerimaan, khususnya dari pajak. Kebijakan ini patut didukung, apalagi jika melihat target pajak dalam APBN yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada postur APBN 2016, target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.546,7 triliun atau sebesar 84,9 persen.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Kamis (10/3), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpotensi menyumbang tambahan penerimaan negara hingga Rp100 triliun. “Potensi penerimaannya bisa di atas 100 triliun rupiah,” ujar Menkeu. Pada kesempatan itu, Menkeu menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak seyogianya dilihat dalam kaca mata yang lebih besar. “Kami melihat kebijakan ini sangat strategis. Dampaknya bersifat makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia,” tutur Menkeu.

Dana yang masuk sebagai dampak pengampunan pajak melalui repatriasi modal dan aset dapat mendorong pertumbuhan dan mendukung stabilitas ekonomi. Jumlah uang orang Indonesia di luar negeri, kata Menkeu, sebenarnya sangat banyak. “Berbagai data mengindikasikan bahwa meskipun uangnya didapatkan di Indonesia, banyak pengusaha yang menyimpannya di luar negeri,” ujarnya. Jika digunakan untuk membangun di dalam negeri, manfaatnya akan terasa terhadap nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan likuiditas perbankan.

Yang juga penting, implementasi kebijakan *tax amnesty* merupakan momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Pemerintah,



menurut Menkeu, tidak menutup peluang bagi para pengusaha Indonesia untuk mendapatkan keuntungan di luar negeri. “Yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai mereka mengambil keuntungan dari luar negeri dengan mengorbankan apa yang harusnya dapat dikontribusikan ke Indonesia,” kata Menkeu.

Di samping itu, pada jangka panjang, kebijakan pengampunan pajak dapat mendorong terwujudnya postur APBN dapat lebih *sustainable* karena basis Wajib Pajak (WP) meningkat dan sistem administrasi pajak lebih baik. Dengan postur APBN yang lebih *sustain*, kemampuan belanja pemerintah akan menjadi lebih besar. Secara otomatis hal ini akan membantu pembangunan, bukan hanya infrastruktur, melainkan juga pembangunan masyarakat.

Kebijakan sekali dan tahun ini

Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty* sekali saja. Mengapa hanya sekali dan mesti di tahun ini? Menkeu menjelaskan bahwa sebagai salah satu negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau *Automatic Exchange System of Information* (AEOI) antarnegara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki, ada aturan main yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kesanggupan melakukan pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara pada tahun 2018.

Dalam menjalankan tugas di lapangan, jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkadang masih

menghadapi kesulitan membuka data perbankan WP karena terganjal Undang-Undang (UU) Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tergolong sebagai rahasia bank. Dengan berlakunya sistem pertukaran data tadi, jika ditemukan ketidakpatuhan pelaporan aset dan pembayaran pajak dari WP pada 2018, mereka tidak akan mendapatkan pengampunan seperti jika mereka mengajukan amnesti pada tahun ini.

Menkeu menegaskan bahwa terkait dengan tenggat waktu berlakunya perjanjian AEOI itu, maka urgensi *tax amnesty* tahun 2016 menjadi jauh lebih signifikan dibandingkan kebijakan serupa pada tahun 1984. “Kepentingannya bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga untuk pembayar pajak yang tentunya ingin menjadi WP yang patuh,” kata Menkeu. Jika WP mengajukan permohonan amnesti pada tahun ini, maka pemerintah akan memberikan pengampunan dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika harta atau aset tidak dilaporkan hingga catatannya terbuka pada 2018, maka pajak dan sanksi administrasi yang dikenakan bisa lebih besar dibandingkan dengan uang tebusan yang harus dibayarkan sesuai peraturan *tax amnesty*.

Menkeu juga menjelaskan bahwa kebijakan *tax amnesty* pada 1984 sangat berbeda jika kita memandang stabilitas dalam negeri dan sistem

"Yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai mereka mengambil keuntungan dari luar negeri dengan mengorbankan apa yang harusnya dapat dikontribusikan ke Indonesia"

Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri
Keuangan

administrasi perpajakan yang ada saat ini. Menurut Menkeu, saat itu Indonesia tengah memulai reformasi di sektor perpajakan dan kebijakan tersebut berhenti di tengah jalan. Dari segi payung hukum, pengampunan pada 1984 berlandaskan pada Keputusan Presiden, sedangkan tahun ini pemerintah mencoba mengajukan Rancangan Undang-Undang. Peraturan hukum yang lebih tinggi tentu akan memberikan jaminan kepastian yang lebih besar karena merupakan produk bersama eksekutif dan legislatif.

Lebih jauh, ruang lingkup pengampunan yang diberikan kali ini lebih luas, di mana *tax amnesty* memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak. Menkeu juga menjamin data yang masuk tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Kebijakan *tax amnesty* juga dapat dimanfaatkan oleh golongan yang luas, antara lain WP yang belum terdaftar, WP yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), WP yang belum membayar pajak, WP yang belum melaporkan penghasilan atau kurang melaporkan penghasilannya, termasuk WP yang dalam penyampaian SPT-nya terdapat kesalahan.

Keberlanjutan reformasi pajak

Ditemui di Kantor Pusat DJP di Jakarta, Senin (14/3), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan kebijakan *tax amnesty* tahun ini penting untuk menjadi *trigger* bagi reformasi di

bidang pajak. “Setelah Rancangan Undang-Undang *Tax Amnesty* kita ajukan, revisi Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) juga akan kita bahas di DPR. Selanjutnya akan diikuti dengan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,” kata Suryo.

Terkait dengan prinsip keadilan, Suryo melihat pengampunan justru menjadi solusi yang pas untuk mengurangi *free rider* yang selama ini tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, tetapi turut menikmati hasil pembangunan dari pajak. Sehingga dari sisi keadilan, solusi berupa pemberian kesempatan terakhir bagi *free rider* harus menjadi salah satu fokus utama.

Implementasi segera

Menkeu berharap pembahasan RUU *Tax Amnesty* yang akan berlangsung di DPR tak lama lagi dapat berlangsung lancar, sehingga kebijakannya dapat diimplementasikan segera. Di samping itu, kepada jajaran pimpinan dan pegawai DJP, Menkeu berharap seluruh unsur di sana bisa mendukung penuh pelaksanaan program amnesti. “Yang paling penting bukan hanya menjadikan amnesti sebagai sasaran target di 2016 saja, melainkan juga landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh,” ujar Menkeu. Dengan adanya kebijakan pengampunan, maka penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data perpajakan menjadi lebih akurat.

Dari Yogyakarta, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Wihana Kirana Jaya mendorong agar DPR dapat mendukung pengesahan RUU *Tax Amnesty*. Bagi legislatif, dukungan terhadap kebijakan ini dapat menciptakan *trustworthiness* masyarakat terhadap institusi tersebut. Kepada pemerintah yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan, Wihana memiliki beberapa pandangan agar kebijakan pengampunan pajak bisa berhasil.

“Syaratnya adalah kebijakan ini ditawarkan hanya satu kali dan secara definitif serta dalam jangka waktu yang terbatas. Di samping itu, *tax amnesty* juga mesti didukung oleh sistem yang siap,” ujar Wihana. Yang sama pentingnya, kemampuan pemerintah untuk mewujudkan perbaikan struktural di bidang ekonomi dan sosial serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk memenuhi janji-janji dalam kebijakan amnesti akan juga berperan penting. Yang terakhir, terhadap aspek penegakan hukum pajak nantinya, kredibilitas dan reputasi sistem administrasi perpajakan perlu untuk dipersiapkan dengan baik.

Senada dengan Wihana, Pengamat Ekonomi sekaligus Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, Christianto Wibisono juga menggarisbawahi pentingnya meraih kepercayaan publik sebagai modal sosial nasional. Pemerintah harus dapat meyakinkan bahwa kebijakan pengampunan pajak harus dilakukan sekarang karena jika hanya menunggu semua masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak, hal itu justru akan menjadi lebih tidak adil bagi WP yang selama ini sudah patuh. “Beban pajak kan tidak terdistribusi secara adil kepada semua masyarakat,” kata Christianto.

Christianto juga mendorong pemerintah memberikan fokus pada transparansi pembayaran pajak. Pemerintah, menurut dia, sudah semestinya kembali memberikan penghargaan kepada para pembayar pajak terbesar melalui pengumuman terbuka dan disampaikan secara transparan, seperti pada zaman Orde Baru. “Hal ini bisa dipelopori kembali oleh Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, wajib pajak berlomba membayar pajak dengan tertib, patuh, dan penuh kebanggaan,” ujar Christianto.

Teks Dwinanda Ardhi

Bicara Tax Amnesty

Rancangan Undang-undang atas tax amnesty sudah masuk pembahasan di DPR. Penerapan kebijakan tersebut adalah dalam rangka memperluas basis pajak, memperkuat APBN melalui penerimaan pajak baru, serta memanfaatkan momentum kemudahan pertukaran informasi pada 2018 mendatang. Berikut adalah opini para akademisi menanggapi rencana pemerintah atas kebijakan tax amnesty.

Zainal Muttaqin

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Unpad

Dari sisi hukum, kebijakan *tax amnesty* bersinggungan dengan kewajiban denda yang harus dibayar dan terkait dengan hukum pidana. Untuk itu, payung hukumnya juga harus berupa undang-undang. Hal ini sudah tepat dilakukan pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan *tax amnesty*, ada hal-hal yang perlu diperjelas, yaitu siapa sasarannya, apa objeknya, dan bagaimana penegakan hukum setelah diberlakukannya *tax amnesty*. Paling tidak, menurut saya, *tax amnesty* akan bermanfaat dari sisi penambahan data wajib pajak, tapi bukan pada penerimaan pajak apabila penegakan hukumnya masih seperti kebijakan sebelumnya.



Nury Effendi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad

Saya cukup optimis dengan hasil (dampak diterapkannya) kebijakan *tax amnesty*. Dari sisi ekonomi, meskipun kecil *benefit*-nya, tetapi masih lebih besar dibanding *cost*-nya. Tax amnesty menjadi baik, apabila terpenuhi beberapa hal. Pertama, ada *policy mix*. Jadi tidak hanya *stand-alone policy*. Selanjutnya, perlu ada *post policy* setelah kebijakan *tax amnesty* diberlakukan agar bisa *sustain*. Terakhir adalah masalah kesadaran, penegakan hukum, dan *culture* atau *mindset* dari pihak yang terkait dengan kebijakan.

Ari Kuncoro

Dekan Fakultas Ekonomi UI

Tax amnesty bertujuan untuk memperluas basis pajak dan memperkuat nilai tukar rupiah melalui sejumlah dana yang masuk dari luar negeri. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menambah instrumen keuangan di Indonesia. Dengan demikian, dana yang masuk dari luar akibat kebijakan *tax amnesty* dapat berputar terlebih dulu di Indonesia. Untuk itu, semoga pembahasan Rancangan Undang-Undang *Tax Amnesty* tidak bertele-tele karena Indonesia butuh kepastian.



Dian Agustia

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair

Pemberlakuan *tax amnesty* memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, antara lain memperkuat cadangan devisa melalui valuta asing yang masuk, menciptakan investasi dan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penerimaan pajak, serta mendorong administrasi reformasi perpajakan. Hal ini dapat memperkuat APBN dan mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sesuai komitmen pemerintah. Dengan demikian, disparitas antarwilayah dan disparitas pendapatan bisa dikurangi tanpa harus membebani APBN dengan utang internasional. Untuk itu, kami berharap *Tax Amnesty* 2016 menjadi kebijakan pemerintah yang didukung oleh DPR dan seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Dahlia Hasan

Ketua Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum UGM

Dalam penerapan *tax amnesty*, pemerintah harus memastikan bahwa Undang-Undang (UU) yang dibuat menjamin hak-hak fiskus dan wajib pajak, sehingga tercapai keadilan. Untuk itu, diperlukan tolok ukur yang jelas dalam undang-undang *tax amnesty*, seperti jangka waktu *tax amnesty*, jumlah pajak yang harus dibayar, dan sanksi administrasi yang dihapuskan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) *Tax Amnesty* harus dapat memberikan jaminan hukum yang mencerminkan prinsip keadilan, baik untuk negara maupun wajib pajak. Hak dan kewajiban keduanya harus dicantumkan dan diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan menghindari kesewenangan. Selain itu, RUU tersebut juga harus menjamin tidak terjadi *vicious circle* di masa mendatang yang berpotensi melemahkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu memiliki sasaran target yang tepat, sehingga mampu mengubah *behaviour* dari wajib pajak bersangkutan. Penguatan *law enforcement* dan sistem administrasi perpajakan harus berjalan seiring dengan kebijakan *tax amnesty*.



Wihana Kirana Jaya

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mendukung implementasi konsep *tax amnesty*. Pertama, undang-undang *tax amnesty* harus menciptakan *trustworthiness*, baik oleh wajib pajak yang sudah patuh, yang belum patuh, maupun yang akan mengikuti *tax amnesty*. Dengan demikian, ada kerelaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kesediaan untuk membayar pajak, serta kemauan untuk mengembalikan modal ataupun aset yang diparkir di luar negeri. *Trustworthiness* juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pembayar pajak maupun petugas pajak itu sendiri.

Kedua, undang-undang *tax amnesty* harus memberi kejelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, aturan kontraktualnya harus lengkap dan memberikan struktur insentif bagi seluruh pihak terkait. Selain itu, perlu dibentuk aturan mengenai lembaga *enforcement* di internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan *tax amnesty*. Keempat, ada biaya kepastian, sehingga efisiensi produktivitas pembiayaan makro ekonomi akan dapat kita tekan. Bila keempat hal tersebut dipenuhi, maka tujuan *tax amnesty* sangat mungkin dicapai.

Memandang Negeri Seberang

Bagi sejumlah negara, *tax amnesty* menjadi alat penghimpun penerimaan pajak dalam waktu relatif singkat. Afrika Selatan, India, maupun Italia menerapkan program ini karena makin parahnya upaya penghindaran pajak.

Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Shanghai, China Februari lalu, pemerintah Indonesia menginginkan komitmen global agar keterbukaan informasi secara internasional segera dilaksanakan. Pada 2018 mendatang diharapkan negara-negara yang tergabung dengan G20 sepakat mengadaptasi pertukaran data perpajakan dan transaksi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of information*).

Kebijakan ini memungkinkan pembagian data perbankan serta data pajak antarnegara. Tak hanya itu, kebijakan ini juga mampu mendeteksi ‘wajib pajak nakal’ yang menyembunyikan aset ilegal di luar negeri, sehingga pemerintah dapat memantau penerimaan warga negaranya. Hasil akhirnya, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, khususnya di sektor pajak pribadi.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari ‘dana parkir’ di luar negeri dengan mengajukan kembali penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia pernah melakukan *tax amnesty* tetapi belum cukup efektif meningkatkan basis pajak akibat minimnya akses informasi.

“Tahun 1984 berhenti di tengah jalan, saat itu Indonesia baru mulai reformasi (sistem administrasi) sektor perpajakan. 2018 nanti sudah terbuka, kita tidak perlu amnesti lagi untuk mendapatkan data. Kebetulan negara-negara lain sudah banyak yang melakukan (*tax amnesty*), tentunya kita akan meniru negara yang berhasil, tapi saya tekankan (*tax amnesty*) di Indonesia ini yang terakhir,” tegasnya.

Afrika Selatan

Ragimun, peneliti Badan Kebijakan Fiskal mengungkapkan hasil analisis *best practice* implementasi *tax amnesty* di Afrika Selatan. “*Tax amnesty* sebetulnya



pengampunan bagi mereka yang mangkir membayar pajak. Tujuannya menarik kembali pajak yang tidak terbayar oleh wajib pajak dengan memberikan kelonggaran atau diberikan pembebasan atas bunga dan denda. Afrika Selatan, dia berhasil secara teknis,” ujar Ragimun.

Pemerintah Afrika Selatan melakukan amnesti pajak dengan menerapkan strategi ‘*pull and push*’. Mekanisme *pull* berupaya menarik atau memberikan insentif kepada wajib pajak agar tertarik berpartisipasi dengan cara penghapusan denda atau bunga pajak terutang, maupun pembayaran tebusan dengan tarif rendah.

Sementara mekanisme *push* berupaya memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak mau berpartisipasi. Caranya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas audit *tax*, membuat strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparan serta menyertakan sanksi pidana pajak (sementara) sebelum program amnesti diumumkan.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Shanghai.

Foto
Dok. G20

“Strategi *pull*, (wajib pajak) diberikan insentif. Misalnya, mereka (wajib pajak) punya kewajiban 100, bunga 10 dengan denda 50. Mestinya dia bayar 160. Kalau dia diampuni dengan system *pull* dia cukup membayar 100. Sementara untuk strategi *push*, pemerintah melakukan pengetatan dengan membuat *intelligent* semakin banyak, makin diburu (wajib pajak mangkir). Artinya (pemerintah) memeriksa, membuat aturan (ketat) dan sanksi (berat) sehingga WP tidak bisa berkelit,” kata Ragimun.

Pemerintah Afrika Selatan juga memberikan kewenangan bagi South African Revenue Services (SARS) dan *exchange control department of the South African Reserve Bank (SARB)*. Mereka berwenang untuk mengawasi aset warga negara Afrika Selatan di luar negeri. SARS juga berupaya memberikan pendidikan wajib pajak dan mempromosikan budaya taat pajak.

Dalam sejarahnya, Pemerintah Afrika Selatan telah melaksanakan amnesti pajak pada tahun 1995,

1996. Kemudian pada tahun 2003, diberlakukan *special amnesty* yang terbatas pada wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri tetapi belum membayar pajaknya di masa lalu.

Penduduk Afrika Selatan dilarang mentransfer devisa ke luar negeri di atas R750 ribu. Aset yang bernilai di atas jumlah tersebut dan berada di luar negeri bila dibawa kembali dan dikenakan amnesti maka akan dikenakan tarif diskon sebesar 50 persen. Sebaliknya, jika dana tersebut tetap di luar negeri, maka akan dikenakan tarif tambahan sebesar 2 persen.

Dalam amnesti ini, jenis pajak yang diampuni hanya PPh orang pribadi dan warisan (*estate duty*), tidak termasuk PPN dan *withholding taxes*. Selain itu, pemerintah Afrika memberikan penghapusan tuntutan tindakan pidana namun terbatas pada pidana perpajakan dan peraturan lalu lintas devisa.

Sebaliknya, aset yang disimpan dan diperoleh di dalam negeri tetapi belum memenuhi kewajiban

perpajakannya tidak akan mendapat fasilitas pengampunan. Apabila kemudian aset tersebut dilaporkan, maka SARS akan memberikan fasilitas penghapusan atas sanksi denda sebesar 200 persen dan memberikan kelonggaran untuk mencicil pokok pajaknya.

Pada saat dimulainya *tax amnesty*, diperkirakan dana yang ‘parkir’ di luar negeri mencapai R90 miliar. Setelah berlalunya kebijakan ini, lebih dari US\$7,6 miliar diperoleh dari program *tax amnesty*.

India

Berbeda dengan Afrika Selatan, India telah menawarkan program *tax amnesty* berkali-kali seperti dikutip dari hasil penelitian Urip Santoso dan Justina Setiawan dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 2009. Sejak tahun 1975, frekuensi pelaksanaan *tax amnesty* di India makin intens dan mudah ditebak yaitu sekitar lima atau enam tahun sekali. Akibatnya, kebijakan ini seolah menjadi iklim melemahnya penegakan peraturan pajak penghasilan.

Pada tahun 1981, pemerintah India menawarkan *tax amnesty* dengan cara berbeda. Pemerintah India menjual obligasi yang jatuh tempo tahun 1991 dengan bunga khusus sebesar 2 persen per tahun. Uniknya, orang yang memegang dana pasar gelap (*black money*) diperkenankan menggunakan uangnya untuk membeli obligasi tanpa adanya pertanyaan asal-usul dana tersebut, serta dibebaskan dari pajak kekayaan deposito dan pajak penghasilan atas bunga pokok saat jatuh tempo. Estimasinya, seseorang yang membeli obligasi akan memperoleh tambahan pendapatan sampai dengan 60 persen dalam waktu 10 tahun.

Meski dinilai mampu menggali penerimaan, program ini tidak

berhasil memperluas basis pajak (penambahan pemegang NPWP baru) dan tidak mendukung untuk upaya pemeriksaan cermat di masa berikutnya. Hal ini karena tidak adanya langkah penguatan regulasi perpajakan atau perubahan struktur lain dalam sistem perpajakannya. Tingkat partisipasi juga dinilai kecil karena warga menganggap akan ada program serupa dengan penawaran yang lebih menarik.

Pada tahun 1997, pemerintah India menerapkan program *tax amnesty* yang dinyatakan sebagai *amnesty* terakhir. Program ini memungkinkan orang pribadi mengumumkan saldo aktiva kena pajak yang diperoleh tahun sebelumnya berdasar harga perolehannya, bukan nilai tahun berjalan. Hasilnya, program ini dapat menggali pendapatan hingga Rs100 miliar atau sekitar US\$2,5 miliar yang berasal dari laporan 350 ribu orang pribadi. Program ini dinyatakan dapat menaikkan basis pajak karena termasuk program menarik ditengah inflasi yang terjadi.

Sepanjang tahun 2004–2013, pemerintah India berhasil mengumpulkan 0,07 persen dari nilai aset mengalir ilegal ke luar negeri yang diperkirakan mencapai US\$510 miliar dari *black money*. Sementara untuk tahun ini, pemerintah India berkomitmen untuk menghapus *black money* dengan memberi kesempatan para pengelak pajak untuk mendeklarasikan hartanya.

Mereka diberikan waktu mulai 1 Juni 2016 hingga 30 September 2016 untuk mendeklarasikan nilai aset sebenarnya. Mereka akan mendapat pengampunan jika membayar tebusan sebesar 45 persen dari nilai aset dirahasiakan sebelumnya. Besaran, sudah termasuk penalti dan biaya tambahan, itu lebih tinggi ketimbang tarif tertinggi pajak penghasilan sebesar 35 persen.

Italia

Sejak tahun 1991 hingga 2009, Italia memiliki sejumlah program *tax amnesty*. Kala itu, pemerintah Italia memberikan ‘keringanan’ bagi pengemplang pajak sehingga mereka dapat membayar dengan tarif lebih rendah. Menariknya, dalam setiap program tersebut, pemerintah Italia selalu menyatakan sebagai ‘kesempatan terakhir’ bagi para pengemplang pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pada kebijakan *amnesti* terbaru, seperti dikutip dari Stefano Grilli dalam The Italian Voluntary Disclosure, pemerintah Italia menggunakan sistem *voluntary disclosure programme* yang berupaya untuk mengembalikan penerimaan negara atas kekayaan warga Italia yang disembunyikan di luar negeri. Dalam program ini, para wajib pajak harus secara sukarela melaporkan dan membayar semua kewajiban pajak yang belum dibayar. Keuntungannya yakni adanya ‘pinalti’ berupa pengurangan (sanksi) yang angkanya lebih kecil dibandingkan bila mereka terkena *tax audit*.

Program ini meliputi ketidakpatuhan atas pelaporan pajak penghasilan, termasuk PPN dan pajak lokal untuk aktivitas produksi (IRAP). Program ini tidak termasuk pada pajak yang terkait dengan warisan, sumbangan, maupun hadiah. Adapun mekanisme besaran pinalti untuk pajak yang belum terbayar, yaitu sebesar 100–200 persen untuk penghasilan yang bersumber dari Italia dan 133–266 persen untuk penghasilan yang bersumber dari luar Italia.

Selain pajak dan denda, warga Italia yang memiliki aset di luar negeri wajib melaporkan hartanya kepada otoritas pajak Italia dan mengajukan formulir (RW Form) sebagai bagian prosedur pengembalian. Jika wajib pajak tidak melakukan pengembalian sesuai formulir tersebut, maka mereka akan mendapat hukuman per tahun. Adapun hukumannya sebesar 3–15 persen dari nilai aset jika berada dalam *whitelisted jurisdiction* dan sebesar 6–30 persen dari nilai aset jika berada dalam *blacklisted jurisdiction*.

Hingga akhir November 2015, pemerintah Italia berhasil mengungkapkan €60 miliar kekayaan tak terdeklarasi. Dari pendekalarasian aset tersebut, pemerintah berhasil menggali penerimaan pajak sekitar €3,8 miliar atau senilai dengan US\$4 miliar.

Melihat apa yang terjadi di negara-negara tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan *tax amnesty* yang tepat. Kebijakan tersebut tentunya harus sesuai dengan kebutuhan internal perpajakan di Indonesia serta berdasarkan pengalaman negara lain yang telah berhasil melaksanakannya.

Teks lin Kurniati

Tax Amnesty Perhatikan Asas Keadilan

Foto
Dok. Biro KLI

Rencana pemberian pengampunan pajak atau “tax amnesty” dirancang untuk peningkatan pendapatan pajak negara sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Pengampunan masal kali ini merupakan rekonsiliasi nasional yang jika berhasil diterapkan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi jangka panjang.

Meski dapat menjadi babak baru dalam penanganan pajak, rencana *tax amnesty* diwarnai dengan isu kesetaraan bagi para wajib pajak. Kebijakan ini dikhawatirkan mencederai rasa keadilan wajib pajak yang selama ini sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengampunan pajak dianggap hanya akan memberikan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh mereka yang tidak patuh.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, harus dipahami

bahwa tingkat ketidakpatuhan pajak di Indonesia jauh lebih tinggi daripada kepatuhannya. Dengan kondisi demikian, *tax amnesty* dirasa penting sebagai jalan untuk menambah penerimaan negara dan memperluas basis wajib pajak. “Negara membutuhkan pendanaan untuk pembangunan dari sekarang, bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi,”kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, hal yang paling penting adalah petugas pajak tidak mengotak-atik wajib pajak yang sudah patuh. “Kalau sudah membayar bayar pajak yang benar ya sudah, tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan. Tapi kita ingin yang tidak patuh untuk masuk ke sistem karena potensinya besar,” katanya.

Menyikapi hal ini, pengamat perpajakan, Darussalam mengajak berkaca pada kebijakan serupa di Jerman yang pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata, menurut Mahkamah Konstitusi Jerman, pengampunan pajak tidak mencederai rasa keadilan. Hal ini didasarkan atas tujuan pengampunan pajak yaitu untuk membawa kembali wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh untuk dipajaki bersama-sama dengan wajib pajak selama ini yang telah patuh.

Dijelaskan Darussalam lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh tetapi menikmati kue pembangunan justru akan memberikan beban yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Apalagi, perilaku tidak patuh cenderung ‘menular’ kepada wajib pajak patuh untuk menjadi tidak patuh. “Dengan demikian, pengampunan pajak dapat dijustifikasi karena merupakan suatu terobosan untuk menjamin luasnya

partisipasi warga negara dalam membayar pajak secara benar,” kata Darussalam.

Pengajar Hukum Pajak asal Universitas Gajah Mada, Dahliana Hasan mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) *Tax Amnesty* harus dapat memberikan jaminan hukum yang mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak, baik untuk negara maupun wajib pajak. Dalam pandangannya, hak dan kewajiban kedua pihak harus dicantumkan dan diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan menghindari kesewenangan.

Selain itu, RUU tersebut juga harus menjamin tidak terjadi lingkaran setan (*vicious circle*) di masa mendatang yang berpotensi melemahkan kepatuhan wajib pajak. “Oleh karena itu, perlu memiliki sasaran target yang tepat, sehingga mampu mengubah *behaviour* dari wajib pajak bersangkutan. Penguatan penegakan hukum dan sistem administrasi perpajakan harus berjalan seiring dengan kebijakan *tax amnesty*,” tegas Dahliana.

Ditanya mengenai dengar pendapat kepada kalangan dunia usaha, Bambang mengatakan bahwa sosialisasi secara informal terus dilakukan. Menurutnya para pengusaha saat ini tengah menunggu dengan cukup antusias. Apalagi pada 2018 ketentuan keterbukaan informasi perbankan antarnegara akan mulai diberlakukan. Sistem ini akan menyaring wajib pajak nakal yang mencoba menyembunyikan aset ilegal di luar negeri. “Mereka juga ingin investasi mereka di Indonesia aman dan nyaman. Kalau semua kekayaan sudah di-*declare* dan punya bekal surat *amnesty*, maka investasi di Indonesia akan semakin mudah,” jelas Menkeu.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah memberikan pernyataan sikap atas penerapan kebijakan ini. Pada dasarnya, Apindo memandang *tax amnesty* diperlukan untuk pemasukan keuangan negara jangka pendek serta meningkatkan kepatuhan pajak dan *tax to GDP ratio* dalam jangka panjang. Selain itu, *Tax amnesty* berpotensi mengembalikan dana Warga Negara Indonesia yang diparkir di luar negeri. Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi belanja pemerintah yang merupakan salah satu penggerak ekonomi selain konsumsi masyarakat, ekspor, serta investasi. Apindo berharap, penerapan *tax amnesty* akan dibarengi dengan prinsip kewajaran ketetapan pajak dan penegakan hukum bagi penghindar pajak di masa depan.

Teks Irma Kesuma

Meraih Penerimaan melalui Pengampunan

Bukan rahasia lagi, tak sedikit aset masyarakat Indonesia yang ‘parkir’ di negeri orang. Tax Amnesty merupakan peluang besar untuk membersihkan catatan pajak mereka dari noda.



Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro

Foto Dok. Biro KLI

Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Suatu tantangan besar bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpul pajak bekerja lebih keras dalam memeriksa Wajib Pajak bahkan menambah jumlah Wajib Pajak baru demi meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan rencana menerapkan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Simak wawancara Media Keuangan dengan Menteri Keuagnan Bambang P.S. Brodjonegoro terkait rencana kebijakan tersebut.

Apa latar belakang Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan Tax Amnesty tahun ini?

Pertama, *Tax Amnesty* harus dilihat sebagai suatu kebijakan ekononomi yang bersifat mendasar. Ini adalah kebijakan yang dimensinya luas, bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal atau perpajakan. Dengan adanya *Tax Amnesty*, diharapkan ada potensi penerimaan yang bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun berikutnya diharapkan APBN kita menjadi lebih *sustainable*. Pemberlakuan *Tax Amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Di sisi lain, kebijakan *Tax Amnesty* ini diharapkan dapat diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Tentunya hal ini akan

"Tax Amnesty ini bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan pembayar pajak."

Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri
Keuangan

sangat membantu stabilitas perekonomian makro kita. Jadi kami melihat kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya bersifat menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia pernah menerapkan Tax Amnesty di tahun 1984 dan Sunset Policy di tahun 2008. Bagaimana pemerintah berkaca terhadap kebijakan tersebut?

Kondisi politik pada tahun 1984 berbeda dengan sekarang. *Tax Amnesty* juga tidak selesai seutuhnya, jadi berhenti di tengah jalan. Pada saat itu *Tax Amnesty* diperlukan karena Indonesia baru saja memulai reformasi sektor perpajakan. Sebelumnya perekonomian kita sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas bumi. Jadi penerapan *Tax Amnesty* saat itu tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak ada keterbukaan informasi secara otomatis. Maka urgensi *Tax Amnesty* di tahun 2016 ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan *Tax Amnesty* tahun 1984 atau kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008.

Apa urgensi dengan adanya rencana keterbukaan informasi di tahun 2018 terhadap penerapan kebijakan Tax Amnesty?

Tax Amnesty ini bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan pembayar pajak. Tentunya kita menginginkan mereka menjadi pembayar pajak yang patuh. Masalahnya, saat ini masih banyak aset yang belum dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia. Maka keterbukaan arus informasi harus dibuat agar tidak ada lagi kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini membuat kita tidak bisa mengakses data perbankan di negara lain karena asas resiprokal tidak terpenuhi. Nanti tahun 2018 sudah ada keterbukaan informasi. Intinya, tidak ada tempat bagi orang Indonesia untuk menyembunyikan harta. Mau tidak mau semua orang harus melaporkan hartanya.

Apakah Tax Amnesty ini meliputi keringanan tariff atau ada keringan pidana juga?

Tax Amnesty ini terdiri dari dua hal, keringanan tarif dan penghapusan sanksi dari pelanggaran pajak. Seperti halnya orang yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tapi masih belum benar. Bisa jadi karena orang tersebut salah atau lupa memasukkan data. Belum tentu itu terindikasi pidana. Maka mereka

juga termasuk kategori yang mendapat penghapusan sanksi. Begitu juga dengan *Tax Amnesty* ini.

Berapa potensi peningkatan penerimaan dengan diberlakukannya Tax Amnesty?

Minimun Rp 60 triliun dari segi penerimaan. Kami melihat potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak. Hal ini didukung oleh berbagai data yang menunjukkan aset tersebut diperoleh dari Indonesia tapi disimpan di luar negeri. Jadi kami melihat potensinya penerimaannya bahkan minimal bisa 100 triliun.

Basis pajak *Tax Amnesty* adalah orang Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi wajib pajak untuk mendeklarasi hartanya yang belum dilaporkan. Keuntungan lainnya, *Tax Amnesty* ini juga bermanfaat bagi orang Indonesia yang belum mempunyai NPWP. Kita berharap, hal ini memberikan peluang bagi mereka yang belum punya NPWP untuk segera mendapatkan NPWP dan segera membayar. Jadi mereka memulai catatan pajaknya dengan *clear*. Namun intinya bukan untuk meningkatkan jumlah WP, tapi bertambahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan adanya *Tax Amnesty*, kita harapkan orang Indonesia yang sudah atau belum memiliki NPWP bisa melaporkan hartanya secara jujur 100 persen.

Apa pesan kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak yang akan mengimplementasikan kebijakan ini?

Kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak, saya harapkan semuanya bisa mendukung penuh pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Tidak hanya menjadikan *Tax Amnesty* sebagai sasaran target di tahun 2016 saja, tapi harus dijadikan landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depan. Kita harap dengan adanya *Tax Amnesty* tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data informasi menjadi jauh lebih akurat. Dengan demikian tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak atau isu terkait gangguan iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang berlebihan.

Teks Pradany Hayyu

Presiden Sampaikan SPT dengan E-Filing

Foto
Dok. Biro KLI



Dalam era globalisasi ini, pemanfaatan teknologi memberikan beragam kemudahan dalam berbagai aktivitas, salah satunya kemudahan melaporkan pembayaran pajak. Terbukti, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh pribadinya melalui *e-filing* di booth pelayanan pajak Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Kamis (3/3).

Dalam sambutannya, Presiden berpesan kepada seluruh WP agar dapat segera melaporkan SPT tahunannya. “Saya harapkan, semua (Wajib Pajak) bisa segera menyampaikan SPT lewat *online* maupun *offline*,” kata Presiden. Menurutny, DJP telah menyediakan fasilitas yang mempermudah para WP untuk melaporkan SPT-nya. “*E-filing* ini lebih simpel, dimanapun bisa kita kerjakan. Dulu kertas sekarang begini

(*online*). Targetnya, semua pembayar pajak mau sampaikan SPT,” tambah Presiden.

Di kesempatan yang sama saat mendampingi Presiden, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap, melalui percontohan pengisian dan penyerahan SPT oleh Presiden serta para menteri, masyarakat tidak lupa untuk melaporkan SPT-nya. “Mudah-mudahan dengan pengisian SPT oleh presiden dan menteri-menteri di awal waktu ini membuat masyarakat Indonesia segera melaporkan SPT-nya. Yang paling penting melaporkan secara betul dan akurat. DJP juga telah menyediakan segala kemudahan termasuk mengisinya secara *e-filing*,” tegas Menkeu.

Sebagai tahun penegakan hukum, pemerintah akan mulai melakukan perbaikan kepatuhan WP. Oleh karena itu, kerja sama dari para WP juga akan sangat berarti bagi keberhasilan program ini. “Kita hanya dalam tahap mengimbuu dan memeriksa yang paling penting

adalah kesadaran dari para WP-nya. Kami akan sangat serius apabila ada WP Orang Pribadi, terutama pembayar pajak besar, yang membayar tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Sebagai informasi, *e-filing system* merupakan cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet. Adapun batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tiga bulan setelah batas akhir Tahun Pajak. Sementara untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan batas waktu penyampaian SPT paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk tahun 2016, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 pada 31 Maret 2016 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada 30 April 2016.

Teks Amelia Safitri

Presiden Resmikan Pusat Logistik Berikat

Foto
Muchamad Ardani



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pembangunannya digagas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Peresmian yang dilakukan di Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3) ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Presiden berharap agar pembentukan PLB ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan logistik nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Seperti diketahui, biaya logistik Indonesia saat ini dinilai kurang efisien karena mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Akibatnya, industri nasional menjadi kurang kompetitif.

Menurut Presiden, beberapa penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia, yaitu bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbulkkan dari luar negeri. Demikian halnya dengan barang ekspor, barang-barang tersebut selama ini ditimbulkkan di Singapura dan Malaysia. “Kalau hal seperti ini tidak

bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing,” kata Presiden. Oleh karena itu, pembentukan PLB ini akan mendekatkan pelaku usaha dengan bahan baku sehingga bahan baku dapat diperoleh dengan lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau.

Selain biaya logistik, Presiden meyakini pembangunan PLB juga akan mengurangi *dwelling time* di pelabuhan. Investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional pun diyakini dapat meningkat. “Saya harap para pengusaha PLB mampu memindahkan penumpukan barang dari luar (negeri) ke sini,” ujarnya.

Lebih jauh, pada tahap pertama ini, izin PLB diberikan kepada 11 perusahaan yang lokasinya tersebar di berbagai daerah dan menimbun berbagai jenis barang pendukung industri nasional. Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan bahwa ke depan, pemerintah masih akan memberikan izin PLB kepada perusahaan logistik yang memenuhi persyaratan.

“Pemberian izin PLB kepada 11 perusahaan saat ini baru dalam tahap pertama, ke depan tentunya izin PLB akan

diberikan kepada perusahaan-perusahaan logistik lain yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya saat peresmian PLB. Menkeu berharap, fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan pasokannya. Dengan demikian, cita-cita besar PLB sebagai hub logistik di Asia Pasifik dapat terwujud.

Sebagai informasi, PLB adalah gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal. PLB memiliki kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta penawaran fleksibilitas operasional lainnya. PLB merupakan salah satu amanat paket kebijakan ekonomi Jilid II untuk menjawab tantangan tingginya biaya logistik nasional yang membuat industri dalam negeri menjadi kurang kompetitif.

Teks Novita Asri H.



NTB Serius Garap Wisata Halal

Foto
Bagus Wijaya



Setelah terpilih sebagai destinasi halal terbaik dunia di ajang *World Halal Travel Award* 2015, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian dilirik wisatawan, khususnya wisatawan muslim mancanegara. Konsep wisata ini merujuk pada gaya hidup halal yang ramah keluarga sebagai daya tarik utamanya. Kepada Media Keuangan, Lalu Gita Ariadi, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah NTB menceritakan visi Pemerintah Provinsi NTB dalam menghidupkan pariwisata di daerahnya. Berikut nukilan wawancaranya.

Apa yang latar belakang penobatan NTB sebagai destinasi halal terbaik dunia?

Sekitar 60 persen kawasan unggulan wisata NTB adalah pantai, pulau-pulau kecil dan pesisir. Sebanyak 9 destinasi berada di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Potensi wisata di NTB ada dari atas gunung sampai dasar laut. Kami punya dua taman nasional yakni gunung Rinjani dan Tambora. NTB juga memiliki atraksi budaya, peninggalan sejarah, kuliner khas, serta taman dan hutan nasional.

Cinderamata unggulan NTB adalah mutiara. Untuk menghasilkan mutiara yang berkualitas memerlukan perairan yang bersih. Hal ini menandakan perairan laut di sini juga bagus untuk olahraga air seperti menyelam dan *snorkeling*. Sebagai sebuah destinasi ekowisata, bisa dikatakan NTB relatif lengkap.

Saat ini, sekitar 90 persen penduduk NTB adalah muslim. Konsep wisata syariah yang diusung adalah menikmati keagungan ciptaan Allah melalui panorama alam yang indah. Dengan *branding halal tourism*, pemerintah daerah tentunya harus menyiapkan kawasan yang secara keseluruhan sesuai nilai-nilai Islami seperti menyediakan zona bebas bikini.

Selain itu, wisatawan harus dapat



dengan mudah menemukan makanan bersertifikasi halal serta fasilitas ibadah bagi musafir. Misalnya, musala dengan tempat *wudhu* yang bersih dan kelengkapan sarung-mukenah yang memadai. Dengan begitu, kewajiban pengunjung sebagai seorang muslim tidak ditinggalkan meski tengah berwisata. *Alhamdulillah* dengan konsep ini kami berhasil meraih penghargaan.

Apa arti penghargaan tersebut?

Penghargaan tersebut merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi segenap jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mulai berbenah. Sanggup tidak kita menjadi tuan rumah yang baik? Kita semua menginginkan suasana kehidupan wisata yang madani. Rukun dan damai antara pengunjung dan masyarakat setempat.

Lalu bagaimana dengan *hospitality* masyarakat kita sendiri? Walau belum sempurna, namun suasana hangat dan tertib akan kita upayakan. Wisatawan harus dianggap sebagai saudara. Mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman. Pemahaman ini perlu diberikan kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi pemerintah maupun melalui peran tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bagaimana layanan kepada wisatawan non muslim?

Meski NTB diarahkan menjadi destinasi wisata halal, namun tak lantas eksklusif khusus muslim saja. Segmen pasar kita, misalnya dari Eropa dan Amerika tetap ada. Mereka tetap bisa

menikmati layanan wisata seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya diupayakan tidak terjadi benturan budaya yang fatal, meski pengembangannya ke wisata syariah.

Saat ini angka kunjungan wisata dari Timur Tengah lebih banyak ke Malaysia dan ke Thailand. Hal ini menjadi tamparan bagi kita. Segmen pasar ini yang ingin kita rebut. Wisatawan dari Timur Tengah tentu tidak bisa optimal berwisata di Bali karena berbagai kendala dan keterbatasan. Tetapi mereka memiliki alternatif yang tak kalah menarik dan lebih sesuai dengan kultur mereka, yaitu di Lombok. Jadi nantinya Lombok tidak akan bersaing dengan Bali, tapi bersanding.

Apa saja tantangan yang dihadapi?

Kita memang punya banyak potensi. Namun potensi tersebut perlu dipoles dan dipelihara. Semua ini memerlukan dukungan aksesibilitas dan konektivitas. Promosi sebagus apapun tidak akan berhasil kalau calon pengunjung kesulitan menuju ke sini. Jadi tantangan utama saat ini adalah membangun daya dukung infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung dari segala aspek.

Kalau arus tamu sudah dapat dirasakan, masyarakat akan punya kesadaran dan naluri sendiri, “Oh kita harus berbenah.” *Enggak* perlu disuruh-suruh bikin usaha *hospitality* mereka akan bikin sendiri kalau melihat peluang usaha itu ada.

Apa lagi potensi ekonomi NTB yang dapat menunjang wisata?

Kami mengembangkan Pijar (sapi, jagung, dan rumput laut). Pijar merupakan komoditas unggulan NTB. Lahan di Pulau Sumbawa masih alami dan terbuka sehingga menjadi tempat pengembalaan yang baik. Kita punya program bumi sejuta sapi. Obsesinya adalah Pulau Sumbawa menjadi kandang nasional penghasil ternak. Investasi di bidang

peternakan kami lakukan untuk menekan impor kebutuhan daging. Harapannya, potensi yang kita miliki bisa dimanfaatkan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita yang secara kultural memang dekat dengan aktivitas itu. Miris juga kan kalau kita terus menerus mengimpor daging sapi.

Begitu pula halnya dengan jagung. Misalnya kami menghasilkan 1 juta ton jagung. Bayangkan berapa harganya kalau harus impor? Kalau harga impor Rp3 ribu, *mbok* beli saja hasil petani kami dengan harga yang sama. Bayangkan betapa sejahtera petani itu nantinya.

Rumput laut juga menjadi komoditas ekspor strategis kita. Produk olahan yang berbahan baku rumput seperti dodol kerap dijadikan oleh-oleh khas NTB. Sebab itu, kami tengah mendorong agar investor berminat mendukung proses hilirisasi rumput laut sehingga nilai tambahnya optimal dirasakan masyarakat.

Seperti apa kendalanya?

Kembali lagi pada keterbatasan infrastruktur. Saat ini industri Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Dalam hal ini, insentif bagi investor yang mau mengembangkan industri ke luar Jawa harus benar-benar konsisten diberikan. Kami pernah membawa hasil jagung kami ke pabrik pengolahan di Cilegon, Jawa Barat yang mampu menghasilkan 32 varian produk termasuk kosmetik. Mereka menilai kualitas jagung NTB cukup baik. Namun karena biaya logistiknya masih mahal, maka akan lebih murah bila mendatangkan jagung dari Amerika Latin.

Hingga saat ini infrastruktur yang dibutuhkan industri di NTB seperti jalan, gudang penyimpanan, hingga pengapalan belum memadai sehingga distribusinya tidak ekonomis. Jika infrastruktur di luar Jawa sudah memadai, industrialisasi juga akan menyebar. Dengan demikian, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah bisa teratasi dan urbanisasi bisa

ditekan. Jadi nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperhatikan pembangunan daerah dan desa sebetulnya sudah tepat.

Bagaimana pemanfaatan dana transfer daerah saat ini?

Diantaranya kami berencana untuk membangun jalan tol *port-to-port* dan *global-hub*. Keduanya adalah mega proyek yang akan memiliki daya ungkit ekonomi yang tinggi. Begitu pula dengan pembangunan Pelabuhan Lembar dan Gili Mas yang mulai dibangun tahun ini, diharapkan dapat mengatasi mahalnya distribusi logistik nasional. Jadi, nantinya pengiriman *container* ke Surabaya menjadi lancar. Disamping itu, dermaga yang akan selesai tahun 2017 ini juga akan menjadi persinggahan kapal pesiar yang mengangkut wisatawan.

Apa target parwisata NTB ke depan?

Dulu, Lombok dikenal sebagai tempat berlibur atau berbulan madu. Konsekuensinya *peak season*-nya adalah waktu liburan. Sekarang kita mulai menjadikan NTB juga sebagai tempat orang bekerja. Sambil bekerja, juga sambil berwisata. Jadilah NTB sebagai *MICE destination. Meeting, incentive, convention, and exhibition*. Rapat kerja nasional, pertemuan-pertemuan, dan *event-event* nasional kita undang semua.

Baru-baru ini perayaan Hari Pers Nasional dilakukan di Lombok. Sekian ribu orang pesertanya ikut menggerakkan ekonomi. Dari layanan penerbangan, taxi, restoran, hingga toko seni, semua kena imbas positif. Dalam waktu dekat akan akan pertemuan legislatif se-Indonesia dan acara *Musabaqah Tilawatil Quran* (MTQ) Tingkat Nasional ke-26. Konsep MICE akan terus kami tingkatkan agar sektor pariwisata NTB menjadi primadona.

Teks Irma Kesuma

Mengawal Kesi­nambun­gan Fiskal dengan Infra­struk­tur

Direktorat PDPPI

Tahun ini semua pembangunan infrastruktur dipercepat. Peran strategis tersebut tak lepas dari keberadaan Direktorat PDPPI Kementerian Keuangan.

Gedung Frans Seda.

Foto
Dok. DJPPR

Direktur PDPPI
Freddy Rickson Saragih.

Foto
Dok. Biro KLI

Infrastruktur merupakan penggerak utama perekonomian bangsa ini. Tak bisa dipungkiri, pembangunan infrastruktur Indonesia masih jauh dibandingkan dengan perkembangan negara tetangga. Kini pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur terus digenjot di berbagai daerah.

Sejarah

Sejak tahun 2005, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang lebih dikenal dengan nama *Public Private Partnership* (PPP). Pada mulanya, Kementerian Keuangan terlibat dalam KPBU mengingat diperlukannya dukungan pemerintah seperti Penjaminan Pemerintah dan Dukungan Kelayakan. Pelaksanaan tugas ini dikerjakan secara *ad hoc* oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal.

Namun disadari, untuk mengadakan KPBU yang bisa menarik minat perusahaan swasta perlu persiapan proyek dan transaksi yang akuntabel dan transparan. Maka, pada pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

di Bali pada tahun 2013, pemerintah berkomitmen membentuk unit yang khusus menangani proyek KPBU di Kementerian Keuangan. Setelah melalui proses pembahasan dan mendapatkan bantuan kajian dari Bank Dunia, maka terbentuklah Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang terdiri dari tiga unit eselon III, antara lain Subdirektorat Penyiapan Proyek KPBU, Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah, dan Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah.

Direktorat PDPPI menangani pemberian dukungan pemerintah, fasilitas penyiapan proyek, penjaminan pemerintah, dan pengembangan skema pembiayaan infrastruktur seperti *Availability Payment* untuk proyek KPBU. Direktorat yang berlokasi di Gedung Frans Seda lantai satu ini juga memiliki fungsi terkait peningkatan kapasitas institusi dalam pengembangan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur.

Direktur PDPPI Freddy Rickson Saragih mengungkapkan, visi Direktorat PDPPI yakni “Menjadi unit pengelola dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur yang profesional, kredibel, dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur”. Saat ini jumlah sumber daya manusia untuk mencapai visi tersebut berjumlah 33 orang.

Capaian kinerja

Meskipun tergolong unit baru, namun Direktorat PDPPI telah memberikan capaian kinerja yang sangat memuaskan. Pada tahun pertama beroperasi, direktorat ini berhasil memenuhi target kinerja terkait pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas hingga capaian sebesar

120 persen. Freddy juga memaparkan beberapa capaian proyek yang ditangani Direktorat PDPPI. Diantaranya yaitu telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama untuk Proyek Palapa Ring Broadband pada bulan Februari 2016 untuk koridor barat dan tengah. Proyek ini mulai diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada pertengahan 2015 dan sudah berhasil diselesaikan proses lelangnya pada awal 2016.

“Kurang lebih ada sepuluh proyek prioritas KPBU yang sedang ditangani dan empat proyek nonprioritas yang berpotensi untuk dilaksanakan dengan skema KPBU,” jelas Freddy yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal selama 5 tahun. Pencapaian lainnya adalah dengan dikeluarkannya persetujuan besaran Dukungan Kelayakan untuk dua proyek yaitu Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur dan SPAM kota Bandar Lampung.

Hingga kuartal pertama tahun ini, Direktorat PDPPI juga tengah menyelesaikan beberapa target kerja. Diantaranya dengan menyelesaikan beberapa tahapan proyek KPBU, seperti

Penugasan BUMN untuk fasilitasi proyek Palapa Ring, dan penyelesaian kajian penerapan skema *Availability Payment* untuk beberapa proyek KPBU potensial. Proyek KPBU potensial ini meliputi pembangunan Rumah Sakit Pringadi kota Medan dan pembangunan Stadion Olahraga dan *Aquatic Centre* di provinsi Bali. “Kami juga sedang merampungkan pembuatan bisnis proses dan *standard of procedure* serta *guideline* untuk pelaksanaan proyek PPP. Sejauh ini, target untuk kuartal satu terkait proyek masih tercapai dan *on track*,” ujar peraih gelar Master in Professional Accounting University of Texas, Amerika Serikat ini.

“Kami mengaktifkan strategi pengelolaan pembiayaan yang tidak berfokus pada hutang tetapi pada investasi,” tambah Freddy. Dengan implementasi skema KPBU, diharapkan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan sumber dari APBN saja namun juga menjaring investasi aktif dan langsung dari swasta kepada sektor-sektor yang produktif seperti infrastruktur. “*Borrow less, invest more* merupakan jargon yang kami usung untuk mendukung pembangunan yang efektif dan *sustainable*,” terangnya.

Tantangan dan Harapan

Setiap pekerjaan tak pernah lepas dari tantangan. Begitu juga yang dialami Freddy selama menjabat sebagai Direktur PDPPI sejak Januari 2015 hingga saat ini. Salah satu tantangan dari sisi eksternal adalah konsep KPBU merupakan konsep yang membawa paradigma baru dalam penyediaan layanan publik. “Untuk dapat berhasil diimplementasikan, skema KPBU harus memiliki sistem dan proses yang mudah untuk dijalankan. Mendesain proses bisnis ini sendiri memiliki proses yang panjang dan banyak pihak yang harus dilibatkan” jelasnya.

Freddy berharap, ke depannya Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian lebih pada isu penyediaan infrastruktur walaupun tanggung jawab penyediaan infrastruktur ada di kementerian teknis. Namun bila menyinggung skema pembiayaan, maka Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi *leader* untuk menentukan skema pembiayaannya sampai dengan memastikan tersedianya layanan tersebut. “Untuk itu, kami berharap Direktorat PDPPI bisa mendapatkan peran yang lebih strategis serta kewenangan yang cukup untuk memastikan bahwa proses pengadaan layanan infrastruktur dengan skema KPBU dapat dijalankan dan menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas, kepastian dan transparansi dalam penyediaan infrastruktur,” ujar pria yang mengawali karir di Badan Pengawas Pasar Modal pada tahun 1985 ini.

Teks Pradany Hayyu

Sang Pengawal Reformasi

Tiga puluh dua tahun berbakti pada negara, Made Arya Wijaya bagai terlahir untuk mengawal reformasi. Ia seolah menjadi saksi perubahan yang masih mengabdi hingga kini.



Sudah menjadi tradisi setempat, ketika liburan sekolah tiba, pemuda-pemudi Bali Utara yang menuntut ilmu di seluruh penjuru nusantara akan kembali ke kampung halamannya. Tak terkecuali di Sekolah Menengah Atas Singaraja, mereka datang untuk mempromosikan kampus yang kini menjadi tempat melanjutkan pendidikan tinggi negeri maupun swasta.

Acara yang kini lebih dikenal dengan istilah *campoes goes to school* itu seolah menjadi salah satu petunjuk bagi Made Arya Wijaya melanjutkan pendidikannya. Terbukti, pasca lulus dari satu-satunya sekolah di Singaraja yang telah berdiri sejak zaman Belanda itu, Made – panggilan akrabnya langsung bertaruh nasib ke Jakarta.

Selain mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, atas saran dari pamannya di Jakarta, lelaki kelahiran Singaraja, 17 Agustus 1965 ini juga mengikuti ujian kedinasan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Akhirnya, diantara ribuan pendaftar, anak pasangan I Nyoman Raka dan Ni Nyoman Manik ini menjadi satu dari 29 mahasiswa yang diterima sebagai angkatan pertama Diploma III Keuangan Spesialisasi Anggaran.

Beruntung

Berbeda dengan rekan satu almamaternya yang tersebar di seluruh Indonesia, Made bersama 20 lulusan pertama spesialisasi anggaran terbilang beruntung. Mereka langsung ditempatkan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Jakarta. Selama penempatan di ibukota, anak keenam dari tujuh bersaudara ini sempat meneruskan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Islam Jakarta hingga tahun 1995.

Dua tahun setelahnya, Made dan angkatannya disebar ke luar Jawa dan Bali.

Lagi-lagi beruntung, Made ditempatkan tak jauh dari tanah kelahirannya, Denpasar. Kesibukan bekerja bukan alasan bagi Made untuk tidak meneruskan pendidikan. Beruntung, Made mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Colorado Denver, Amerika Serikat yang berangkat pada pertengahan millennium kedua.

Uniknya, bila kebanyakan rekan-rekannya mengambil konsentrasi *public finance* atau *public administration*, lain halnya dengan Made yang lebih memilih mengambil bisnis. “Dulu saya diskusi dengan Sesditjen, saya ingin mengambil (jurusan) *finance* dengan konsentrasi bisnis. Saya kasih pertimbangan, apakah tidak mungkin pengelolaan keuangan negara di-*treatment* seperti halnya bisnis, mungkin akan lebih efisien,” ceritanya.

Beruntung, menurut Made, dirinya merasa tidak salah ketika memilih jurusan. Sejalan dengan era reformasi keuangan negara, kini pendekatan pengelolaan keuangan ternyata lebih mengarah ke bisnis yang mementingkan efisiensi dengan melihat sisi *cost and benefit*.

Sepulangnya dari Amerika, Made sempat dipercaya sebagai koordinator pelaksana penyusunan anggaran 1 sebelum ditempatkan diberi tanggung jawab sebagai Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai. “Dulu orang-orang menyebutnya sebagai kepala sekolah, mengurus pegawai diklat. Kita baru pulang sekolah setelah itu menyekolahkan orang lain.”

Pada tahun 2003, terjadi reorganisasi di Kementerian Keuangan. Pada masa itu, Made memilih tetap bergabung dengan DJA yang berubah nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK).

Beruntung, keputusannya memilih DJAPK membuatnya dipercaya sebagai Kepala Seksi Anggaran I B-3 yang bertugas menangani alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya. Setahun kemudian, Made

diberi kepercayaan menjadi kepala Seksi Anggaran I B-2 yang bertugas menangani alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga.

Beruntung, pada tahun 2007, Made diberi kesempatan menjabat sebagai Kepala Seksi Kebijakan Pembiayaan Negara Direktorat Penyusunan Asumsi Makro (DPAM). Tiga bulan kemudian, menjabat sebagai Kepala Seksi Kebijakan Belanja Negara, DPAM. Satu tahun berselang, dibentuklah satu unit baru bernama Direktorat Sistem Penganggaran tetapi masih menggunakan nomenklatur nama DPAM.

Menarik

Mendapat penugasan khusus untuk mengawal reformasi, membuat anak lelaki dari seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Singaraja ini tertarik bergabung pada Direktorat Sistem Penganggaran. Made menjelaskan bahwa kala menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran hingga Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, dirinya berupaya membuat perubahan pada sistem penganggaran di Indonesia.

“Jika dulu orang berpikir bagaimana caranya mendapat pagu yang besar, sekarang baru bisa dapat alokasi jika punya rencana dan target yang pasti. Kalau dulu berpikir *input base*, sekarang kinerjanya apa lalu perlu anggarannya berapa. (Dengan kata lain) Jika dulu orang berpikir (menggunakan pendekatan) *budget oriented* sekarang *performance oriented*,” jelas Made.

Untuk itulah, tutur Made seperti dikutip dari buku pedoman reformasi penganggaran, pihaknya menyiapkan tiga fase reformasi. Pertama, fase pengenalan reformasi (2005 – 2009) berupaya membangun konsep dan memperkenalkan sistem reformasi penganggaran. Kedua, fase implementasi (2010 – 2014) berupaya



Made Arya Wijaya

TEMPAT/TANGGAL LAHIR:
Singaraja/ 17 Agustus 1965

PENDIDIKAN:
Diploma III Spesialisasi Anggaran STAN (1987); Sarjana Ekonomi Universitas Islam Jakarta (1995); Master of Science Universitas Colorado Denver, Amerika Serikat (2001).

RIWAYAT JABATAN:
Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran (2008-2011); Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran (2011-2014); Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNPB (2014-2015); Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2015-sekarang).

mengimplementasikan konsep dan sistem tersebut.

Barulah saat ini, memasuki fase ketiga atau yang dikenal dengan fase penyempurnaan. Pada tahap inilah terjadi penyesuaian atas konsep yang telah dibangun dengan implementasi di lapangan. Jika ternyata tidak sesuai dengan perubahan, maka akan terus dilakukan penyempurnaan. “Yang paling berat itu mengubah *mindset*, menyadarkan orang. Mengajak untuk berubah itu susah karena dia sudah terlanjur nyaman dengan sistem yang lama. Disinilah seninya.”

Pada September 2014, Made menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa dirinya ditugaskan menjadi Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNPB di Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Dalam waktu bersamaan, Made juga mendapatkan kepercayaan mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP) dan pada November 2015, Made secara resmi diangkat sebagai Direktur HPP.

Made melihat bahwa unit yang dipimpinnya memastikan agar regulasi yang dibuat tidak tumpang tindih, tidak *redundant*, dan memiliki nilai tambah (*value added*). Lalu, bila dilihat dari perspektif anggaran, Made selalu menilik sejauh mana implikasi dari regulasi tersebut pada APBN (efisiensi anggaran), dan apakah sudah sejalan dengan kaedah pengelolaan keuangan negara.

Ada pengalaman menarik yang pernah dilakukan oleh Made, yakni saat dirinya harus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Timur Tengah saat organisasi radikal tengah bergejolak pada pertengahan tahun 2015 silam.

Made bercerita bahwa mulanya Presiden memberikan arahan kepada Menteri Luar Negeri untuk memastikan kondisi kedutaan Republik Indonesia di negara rawan konflik tersebut. Lantas, Menteri Luar Negeri meminta Sekretaris Jenderal Kementerian

Foto
Arfindo Briyan

Keuangan untuk menugaskan salah satu punggawanya mendampingi mereka.

“Saya ikut pergi. Pertama ke Kabul, Afganistan. Baru datang disambut bom di sebelah kedutaan RI. Kedua ke Bagdad, Irak yang saat itu kondisinya parah sekali, tidak ada pembangunan sejak enam tahun lalu. Setelah itu terbang ke Yaman baru kemudian ke Kairo, Mesir. Di Mesir juga sedang rusuh, pemerintahannya kacau, tingkat kriminalitas tinggi jadi kehidupan sehari-hari warganya sulit. Terakhir, saya ke Libia,” paparnya.

Harapan

Dalam karir ke depan, lelaki yang memiliki moto hidup rajin bekerja dan jangan lupa berdoa ini berharap dapat menjadi orang nomor satu di DJA. “Kalau boleh punya punya harapan punya cita-cita, saya merasa mengawali karir, sekolah saya di spesialisasi anggaran, termasuk saya orang (asli) anggaran yang tersisa. Tentunya berdoa, kalau bisa menjadi orang nomor satu di DJA karena secara prinsip jabatan karir di birokrasi tertingginya adalah Eselon I,” ungkapnya.

Sementara di sisi pekerjaan, Made berharap di masa yang akan datang pengelolaan anggaran dan belanja negara makin berkualitas dan berkeadilan. Made berpandangan bahwa orang keuangan harus selalu berbicara *value for money*, sehingga seberapa pun penerimaan yang diperoleh dari rakyat dapat bermanfaat kembali bagi kehidupan rakyat.

Sementara di luar pekerjaan, pria memiliki hobi bermain golf ini lebih memilih untuk beristirahat. “Saya santai saja tidak terlalu muluk. Saya menghindar ikut organisasi profesi, apalagi politik. Lebih baik menikmati hidup. Minimal apa yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi berkah,” katanya.

Teks Ilin Kurniati

Perbaiki Regulasi dan Iklim Investasi

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan yang dirilis oleh Badan Kebijakan Fiskal untuk periode 29 Februari-6 Maret 2016 menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi global terutama Amerika Serikat dan kawasan Eropa menunjukkan perbaikan. Hal yang berbeda dilaporkan untuk kondisi perekonomian negara berkembang yang masih mengalami perlambatan.

Perekonomian Amerika Serikat terdorong oleh meningkatnya aktivitas, baik sektor manufaktur maupun nonmanufaktur yang lebih baik jika dibandingkan bulan sebelumnya. Meningkatnya aktivitas di sektor manufaktur dan jasa didukung oleh perbaikan penjualan ritel bulanan dan tahunan. Dari sisi tenaga kerja, data *nonfarm payrolls* bulan Februari lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Data tingkat pengangguran tidak mengalami perubahan.

Laporan tersebut juga menyajikan data perekonomian di kawasan Eropa yang menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi lebih baik. Pemicunya adalah penjualan ritel. Data tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan. Dari Jepang, sinyal perbaikan mulai terasa. Namun, secara umum perekonomian masih tertahan. Pasar tenaga kerja dan manufaktur menunjukkan peningkatan aktivitas dan unemployment rate turun. Namun, belanja rumah tangga dan penjualan retail masih mengalami penurunan.

Untuk *update* kondisi negara berkembang, perekonomian Tiongkok masih terdampak perlambatan. Hal ini bisa dilihat dari turunnya target pertumbuhan yang semula 7 persen pada tahun lalu menjadi 6,5-7 persen untuk tahun ini. Tiongkok juga diketahui berencana menambah defisit anggarannya. Sementara itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Brazil yang kembali negatif pada Q4 2015 menunjukkan bahwa perekonomian negeri itu masih berupaya keluar dari resesi. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya

aktivitas sektor industri, manufaktur, dan jasa di tengah rendahnya harga komoditas.

Kondisi dalam negeri

Dari tanah air, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016 berpotensi terus membaik dan diperkirakan lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah. Bank Indonesia (BI) memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2016 berada pada kisaran 5,2-5,6 persen (yoy).

Akselerasi belanja modal yang relatif cepat pada dua bulan pertama akan menjadi pendorong bergeraknya sektor investasi. Sementara itu, investasi swasta diperkirakan baru akan meningkat pada periode sesudahnya. Konsumsi rumah tangga diprediksi masih relatif kuat. Hal ini tercermin dari daya beli yang terjaga, penjualan eceran yang meningkat, dan kepercayaan konsumen yang cukup baik.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, pada Kamis (17/3) mengungkapkan bahwa kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan. Hal ini seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi global dan masih menurunnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi dunia sendiri pada tahun 2016-2017 diperkirakan masih lebih lambat dari perkiraan sebelumnya, di mana pemulihan ekonomi yang belum kuat terjadi di sejumlah negara maju dan perlambatan ekonomi membayangi negara berkembang. “Di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan masih rendah, akibat tingginya pasokan di tengah

permintaan yang masih lemah,” ujar Tirta.

Yang juga menjadi pemberitaan adalah keputusan BI menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps), dari 7 persen menjadi 6,75 persen. Hal ini diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (17/3). Tirta Segara dalam keterangan resmi BI yang dirilis Kamis (17/3) menyatakan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dan seiring dengan terjaganya stabilitas makro ekonomi, khususnya terus menurunnya tekanan inflasi pada tahun 2016 dan 2017, serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Di tengah masih lemahnya



pertumbuhan ekonomi global, kebijakan penurunan BI Rate tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya meningkatkan permintaan domestik untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas makro ekonomi,” tutur Tirta. Dewan Gubernur, sebagaimana ditulis dalam keterangan tersebut, akan lebih berhati-hati dalam menentukan pelonggaran moneter selanjutnya, dengan mempertimbangkan asesmen dan perkiraan menyeluruh atas kondisi makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan domestik serta perkembangan ekonomi global. Selain itu, untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, BI dan pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan inflasi. “Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tirta.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap dengan penurunan BI Rate ini tingkat bunga pinjaman akan ikut turun, sehingga dapat mendorong pergerakan pada sektor riil. Ditemui wartawan di Gedung DPR pada hari yang

sama, Menkeu berharap tingkat bunga pinjaman ikut menurun sehingga sektor riil ikut bergerak dan investasi swasta bisa terdorong.

Menkeu menilai kebijakan penurunan tingkat suku bunga salah satunya telah mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral AS, The Federal Reserve. “Memang ada ruang untuk melakukan itu, dan kemarin *kan The Fed* sifatnya *dovish* ya, artinya tidak akan menaikkan dalam waktu dekat. Jadi masih ada ruang,” ujar Menkeu. Dengan kondisi perekonomian global yang dinamis, setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari kondisi yang dapat berubah setiap saat.

Ekspor naik

Masih laporan tentang kondisi ekonomi dalam negeri, nilai ekspor Indonesia Bulan Februari 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,80 persen, dari USD10,48 miliar menjadi USD11,30 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada kenaikan dari ekspor nonmigas sebesar 8,67 persen atau dari USD9,37 miliar menjadi USD10,19 miliar. Sementara itu, ekspor migas juga mengalami kenaikan 0,47 persen atau dari USD1,108 miliar menjadi USD1,113 miliar.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas terjadi pada perhiasan/permata sebesar USD593,7 juta atau 153,80 persen. Sementara itu, penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD48,7 juta atau 4,44 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari-Februari 2016 mencapai mencapai USD21,78 miliar atau turun 14,32 persen.

Sementara itu, untuk nilai impor, data BPS menyebutkan bahwa ada penurunan 2,91 persen atau sebesar USD10,16 miliar. Penurunan terjadi pada impor nonmigas yang sebesar USD9,05 miliar atau turun 2,13 persen, sedangkan untuk impor migas juga mengalami penurunan sebesar 8,79 persen. Untuk

nilai impor Januari-Februari 2016 mencapai USD20,63 miliar atau turun 14,48 persen.

Laporan IMF dan Bank Dunia

Pada bulan ini, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia mengeluarkan laporan tentang perekonomian Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporan hasil asesmen Article IV Consultation, penguatan signifikan dalam kerangka kebijakan Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan ketahanan makroekonomi, sehingga berhasil memperkuat stabilitas makro ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Hal tersebut membuat Indonesia berhasil meminimalkan dampak gejolak eksternal yang sulit pada tahun 2015, yang antara lain ditandai dengan jatuhnya harga komoditas, pergeseran kondisi keuangan global, dan pertumbuhan yang melamban di negara mitra dagang.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen ekonomi yang baik serta reformasi yang tepat pada waktunya, khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor yang membawa Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan kinerja terbaik sepanjang 2015. Dalam portal IMF, Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, manajemen moneter yang baik dan pengelolaan fiskal yang bijaksana telah memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Luis menambahkan kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang baik dengan ditandai capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, inflasi yang tepat sasaran, serta penurunan defisit neraca transaksi berjalan. “Kinerja makro ekonomi Indonesia baik di tahun 2015. Meskipun lingkungan eksternal lebih lemah, tetapi pertumbuhan ekonominya tetap merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara berkembang, yaitu 4,8

persen di tahun 2015. Inflasi jatuh ke dalam kisaran target bank sentral (3–5 persen) dan defisit neraca sekarang ini menyempit,” ujar Luis.

Dia menggarisbawahi bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan yang kuat, pemerintah perlu mendorong dan memperluas reformasi. Hal ini penting untuk meningkatkan investasi infrastruktur, memperkuat lingkungan bisnis, dan membuka perdagangan.

Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 berkisar sebesar 5,1 persen dan 5,3 persen untuk 2017. Angka ini terkoreksi 0,2 persen lebih rendah dibanding proyeksi pada Bulan Desember 2015. Namun, Bank Dunia juga melihat ada peluang untuk perbaikan jika dibanding pertumbuhan Indonesia tahun 2015 sebesar 4,79 persen.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves mengungkapkan bahwa angka pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan negara pengeskor komoditas lainnya. Yang patut diperhatikan, sebagaimana tertulis dalam siaran pers Indonesia Economic Quarterly, Selasa, (15/3), pertumbuhan di bawah enam persen tidak cukup untuk menampung tiga juta anak muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Bank Dunia menilai pemulihan ekonomi Indonesia akan bergantung pada kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha, menarik investasi swasta yang lebih banyak, serta diversifikasi ekonomi. “Perbaikan yang lebih tangguh butuh investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan guna memperbaiki iklim usaha,” ujar Rodrigo.

Teks Dwinanda Ardhi

The infographic is set against a textured, light grey background with orange geometric shapes and lines. At the top, the text 'penyampaian LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI & DAFTAR HARTA KEKAYAAN' is written in large, bold, black and orange letters. Below this, a large orange envelope icon contains the letter 'e'. To the right, the text 'lebih mudah dengan e-LP2P elektronik LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI' is written in orange. In the bottom right corner, a large orange '30' is followed by 'APRIL' in orange letters, with the word 'DEADLINE' in black above 'pengumpulan' in orange. In the bottom left corner, the text 'kunjungi lp2p.depkeu.go.id info lebih lanjut' is written in orange, followed by an email icon and 'fimlp2p@depkeu.go.id' and a phone icon and '021 352 1863' in orange. At the bottom left, there is a logo of the Inspector General of Taxation (Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) and the text 'Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan' in black.

Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016

Teks Joko Tri Haryanto,
pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI*

Setelah melewati badai ekonomi di tahun 2015, pemerintah merasa yakin perekonomian akan semakin membaik di tahun 2016. Karenanya, dalam kebijakan APBN 2016 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75 persen atau sebesar Rp1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun. Kenaikan target penerimaan perpajakan yang terus meningkat, tak lepas dari upaya presiden untuk membawa Indonesia berpindah strategi dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam (SDA) menuju negara yang modern dimana perpajakan menjadi motor utama pembangunan.

Meskipun terasa berat, peningkatan target pendapatan dan perpajakan ini menjadi agenda utama yang wajib didukung seluruh pihak. Terlebih mulai penganggaran APBN 2016, tercatat

beberapa terobosan revolusioner dilakukan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Program tersebut antara lain pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara, percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, percepatan pengurangan kesenjangan antara lain melalui perluasan *coverage* program keluarga harapan, dan menjaga kesejahteraan aparatur negara dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13.

Selain itu penetapan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2016 juga pertama kalinya mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (belanja K/L). Kemudian pemerintah juga meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan dana alokasi khusus untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional, meningkatkan alokasi dana desa hingga 6 persen dari dan di luar



Ilustrasi
Arfindo Briyan

transfer ke daerah sesuai *road map* dana desa 2015-2019 sekaligus mempertajam alokasi penyertaan modal nasional melalui peningkatan peran BUMN dan penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur (listrik, jalan, bandara dan pelabuhan).

Tax amnesty dan kinerja pajak

Beberapa kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait upaya pengamanan pencapaian target pendapatan dan perpajakan khususnya adalah optimalisasi pemeriksaan melalui *focusing* sektor-sektor unggulan dari masing-masing kantor wilayah, mengurangi *transfer pricing* dan *fraud*, data *matching*, optimalisasi IT, *e-tax invoice*, serta perbaikan regulasi. Tak ketinggalan, tahun 2016 juga dijadikan momentum sebagai tahun penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan.

Sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2016 ini pemerintah kembali mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal sebagai *tax amnesty*. Harapannya, dengan memberikan kebijakan pengampunan pajak ini, pihak-pihak yang menikmati kue pembangunan, tetapi belum memberikan pembayaran pajak dengan benar, akan tertarik untuk segera melaksanakan kewajibannya. Di tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan *tax amnesty* ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar Rp60 triliun. Namun, ke depan kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan *underground economy* yang selama ini luput dari data perpajakan.

Sayangnya, rencana penerapan kebijakan *tax amnesty* tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak menduga bahwa penerapan *tax amnesty* lebih didasarkan kepada permasalahan pemenuhan target

penerimaan perpajakan semata. Pengalaman *tax amnesty* tahun 1984 yang dirasa tidak terlalu sukses juga menjadi dasar pertimbangan utama pihak-pihak tersebut selain faktor belum siapnya infrastruktur dan keterbukaan data dari seluruh pihak yang nantinya terlibat.

Secara teori, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyeter pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban membayar pajak.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respons Wajib Pajak (WP) yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Tahun 2008 misalnya, pemerintah kembali menjalankan kebijakan *sunset policy* yang boleh dikatakan menjadi miniatur kebijakan *tax amnesty* secara keseluruhan. Dengan kebijakan *sunset policy*, maka pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi, baik bagi WP yang kurang bayar maupun mereka melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kebijakan *sunset policy* jilid I tahun 2008 berhasil menghimpun dana hingga Rp7,46 triliun.

Berkaca dari ketidakberhasilan kebijakan *tax amnesty* tahun 1984, salah satu hal pokok yang menimbulkan keraguan bagi pihak WP adalah persoalan regulasi. Kebijakan *tax amnesty* tahun 1984 tidak didasarkan kepada payung hukum Undang-undang (UU). Karenanya, langkah pemerintah untuk mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang *Tax Amnesty*

kepada DPR, sudah merupakan hal yang sangat tepat, meskipun menimbulkan membutuhkan waktu pembahasan yang semakin panjang. Perbaikan mekanisme data base pajak serta kerelaan seluruh pihak untuk melakukan mekanisme tukar menukar basis data juga menjadi faktor krusial lainnya yang wajib diperhatikan.

Jika nantinya seluruh modal awal tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka penulis yakin kebijakan *tax amnesty* akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi struktur APBN ke depan. Pengalaman di banyak negara sudah membuktikan hal tersebut. Korea Selatan, Afrika Selatan, dan India adalah contoh-contoh negara yang sukses menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Besarnya potensi dana masyarakat Indonesia yang terparkir di luar negeri, juga terlalu sayang untuk dibiarkan begitu saja tanpa memberikan dampak pembangunan nasional. Di atas itu semua, isu nasionalisme jelas menjadi *ultimate factor* yang harus selalu ditegakkan.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.



ext.
2722 (hibah langsung)
2615 (hibah terencana)

email.
hibah.djppr@kemenkeu.go.id

website.
www.djppr.kemenkeu.go.id/hibah



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Kehidupan yang Riang Bagi Fuji

Hari kedatangan Fuji Riang Prastowo di Belanda sekaligus menjadi hari pertamanya kuliah program S2. Di Radboud University yang terletak di Kota Nijmegen, Fuji–akrab dia disapa–masuk kelas dengan membawa koper dari kampung halamannya, Yogyakarta. Tiga bulan pertama di Negeri Kincir Angin dikenang Pria Kelahiran 18 September 1990 itu sebagai masa adaptasi yang penuh cobaan.

Segala pekerjaan yang tersisa sebagai Direktur Departemen Riset di Yogyakarta Biennale Foundation mesti dibereskan Fuji sebelum mendapat restu atasannya untuk *resign* dan melanjutkan pendidikan. Hari-hari sebelum terbang ke Belanda adalah periode yang superpadat baginya. Belum lagi, anak pertama dari tiga bersaudara itu juga harus menyelesaikan semua tugas Persiapan Keberangkatan yang diberikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sponsornya.

Ketika menginjakkan kaki di Nijmegen, Fuji belum mendapatkan tempat tinggal. Beberapa mahasiswa di Perhimpunan Pelajar Indonesia membantu mencarikannya flat. Cobaan pertama adalah dia mendapatkan flat yang terletak sangat jauh dari kampus. “Saya harus naik sepeda sepanjang 26 kilometer pulang pergi setiap hari. Tiap hari rasanya mau menangis saja,” ujar Fuji. Bukan hanya lokasinya yang menguras energi, Fuji juga harus beradaptasi dengan cuaca. Pada musim dingin, dia sempat terserang

hipertermia.

Program S2 yang diambil Fuji, *Master Culturele Antropologie en Ontwikkelingsociologie (Master of Anthropology and Development Studies)* adalah ilmu yang sangat spesifik. Dalam satu kelas, hanya ada 12 mahasiswa dan Fuji adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia. Cobaan kedua adalah penyesuaian dengan sistem belajar di kampusnya. Pada periode awal masa studinya, ujian dilaksanakan tiap minggu. Fuji sempat gagal pada dua mata kuliah. Salah satunya mata kuliah antropologi agama. “Kegagalan itu sempat membuat saya berpikir apakah saya seperti tidak punya agama,” kata Fuji.

Apalagi, Fuji merasa sudah belajar keras untuk menghadapi ujian. Dia pernah tidak tidur selama 35 jam. Teman-temannya sampai bertanya,”*Are you zombie?*” Di tengah kegalauan karena tidak lulus ujian itu, cobaan ketiga datang. Salah satu teman dekatnya yang berasal dari Italia tiba-tiba bunuh diri dengan lompat dari lantai delapan flat tempat mereka tinggal. Pada saat itu, Fuji sempat merasa ingin pulang saja.

Terbang dari Afrika

Bagi Fuji, perjuangan meneruskan studi di Belanda memang tak mudah sejak awal. Ketika dinyatakan lulus tahap administrasi beasiswa LPDP, dia sedang menyelesaikan penelitian bersama Yogya Biennale Foundation dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta di Antananarivo,

 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Madagaskar. “Tahap wawancara dilakukan tepat dua hari setelah saya mendarat di Yogyakarta,” tutur Fuji.

Proses kepulangan Fuji ke tanah air pun tak mulus. Dia sempat tertahan di bandara karena ketika itu sedang terjadi kasus penembakan di Kenya. Fuji juga belum sempat disuntik vaksin seperti prosedur umum orang yang bepergian dari Afrika. “Waktu saya di Madagaskar sempat sakit. Saya telat divaksin,” katanya. Empat hari sebelum seleksi, Fuji mesti menempuh penerbangan Antananarivo–Jomo, Kenya–Mumbai, India–Singapura–Jakarta, sebelum tiba di Yogyakarta. Total durasi perjalanannya adalah tiga hari. “Sangat lelah dan tanpa persiapan untuk seleksi wawancara, tapi Tuhan melancarkan jalan. *Alhamdulillah* saya lolos,” kata Fuji.

Jatuh cinta pada Belanda

Setelah tiga bulan yang penuh cobaan, Fuji mulai kerasan tinggal di Belanda. Dia memutuskan pindah ke flat yang lebih dekat dari kampus. Yang membuatnya nyaman, meskipun kuliahnya tetap padat, Fuji bisa melaluinya bersama “keluarga” barunya di sana. Mereka adalah komunitas orang Suriname yang tinggal di Belanda.

Diterima di Komunitas Suriname adalah berkah yang disyukuri Fuji. Tema penelitian etnografi yang ingin dia lakukan untuk studinya adalah tentang masyarakat Jawa–Suriname di Belanda. Keinginan ini muncul sejak Fuji bertemu dengan



Fuji Riang Prastowo.

Foto Dok. Pribadi

orang-orang Jawa–Suriname yang sedang berlibur ke Yogyakarta pada tahun 2014. “Mereka sedang ‘mudik’. Orang-orang Jawa–Suriname itu ‘lebih Jawa dari orang Jawa itu sendiri,’” kata Fuji.

Di samping itu, alasan lainnya adalah Fuji melihat bahwa kondisi karakter masyarakat Indonesia saat ini merupakan hasil dari sejarah panjang penjajahan masa Hindia Belanda. “Antropologi mengambil peran signifikan dalam politik adu domba pada masa kolonial Belanda melalui penetrasi sosial dan kebudayaan,” tutur Fuji. Dia ingin belajar tentang bangsanya melalui resonansi sejarah di Belanda.

Hari-hari di Negeri Van Oranje kemudian adalah masa-masa yang riang, seperti namanya. Bukan hanya diterima di Komunitas Suriname, Fuji bahkan dijadikan anak angkat oleh beberapa

keluarga di sana. Jika mahasiswa Indonesia lain mengisi akhir pekan atau liburan keliling Eropa, maka Fuji memilih mengunjungi satu persatu keluarga Jawa–Suriname yang tersebar se-antero Belanda. “Bukannya berfoto di Menara Eiffel, kegiatan saya adalah ikut bersih kuburan, Kenduri, dan acara-acara yang identik dengan kegiatan di kampung–kampung Jawa,” kata Fuji.

Di tengah-tengah Komunitas Jawa–Suriname, Fuji lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa Jawa. “Mereka baiknya minta ampun,” ujar Fuji. Komunitas tersebut merasa memiliki kedekatan batin dan asal usul dengan Fuji. Kakek dan nenek leluhur mereka adalah orang Jawa yang ditipu Belanda dengan ditawari pekerjaan di tempat yang sangat jauh dari tanah kelahirannya. “Padahal maksud

Belanda adalah mengurangi populasi penduduk di Pulau Jawa,” kata Fuji. Jangan heran, kata Fuji, jika suatu saat mengunjungi komunitas ini, maka kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang fasih berbahasa Belanda, berpakaian seperti layaknya warga Belanda, tetapi berwajah sangat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga banyak menggunakan bahasa Jawa. Selain bisa sekaligus melakukan penelitian untuk tesisnya, Fuji juga selalu dibekali banyak makanan ketika hendak kembali ke flat. Teman-temannya satu flat selalu menyambut Fuji dengan riang saat dia pulang.

Menekuni antropologi

Di ilmu antropologi dikenal satu istilah “*the notion of serendipity*” atau kejadian tidak terduga selama penelitian etnografi. Kejadian tidak terduga paling besar adalah ketika di tengah penelitian, Fuji secara tidak sengaja berhasil merekatkan kembali tali silaturahmi keluarga yang terputus sejak 1930–2015 antar Jawa Suriname dan Jawa Indonesia. Kejadian ini kemudian diliput oleh beberapa media massa di Indonesia.

Pengalaman di Belanda membuat Fuji yakin akan pilihan hidupnya untuk menjadi ahli antropologi. Mimpi terbesarnya adalah menjadi pemimpin proyek besar penelitian dengan misi kebudayaan yang beranggotakan antropolog dan senias dokumenter untuk mendatangi tempat-tempat di mana orang-orang berdarah Jawa tinggal, tetapi belum banyak media Indonesia meliputnya. Beberapa tempat yang ingin dikunjungi Fuji adalah Cocos Island, Karibia, Srilangka, dan New Caledonia. Sambil mewujudkan mimpi jangka panjangnya itu, Fuji tengah menunggu waktu untuk melanjutkan pendidikan S3 di Radboud University. Dia diterima di program S3 tepat satu hari setelah diwisuda untuk program masternya.

Teks Dwinanda Ardhi

Indonesia Dalam Putaran Ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat

Teks Rostamaji, Pegawai Sekretariat Jenderal

Pergeseran jalur ekonomi dunia mengarah kepada Asia. Namun, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia menjadi tiga pilar kekuatan ekonomi dunia yang berpengaruh sangat kuat karena keunggulan yang mereka miliki. Indonesia berada di tengah-tengah tiga kekuatan ekonomi tersebut, terutama kekuatan ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, Rusia hadir sebagai kekuatan ekonomi baru yang juga harus diperhitungkan karena telah mampu meraih pendapatan nasional lebih dari 2 triliun dollar AS. Sejak Uni Soviet mengalami perpecahan di tahun 1991 sampai 2014, rata-rata pendapatan nasional Rusia mencapai sebesar 836 miliar dollar AS (*The World Bank statistics*).

Kenaikan pendapatan nasional Rusia sebagian besar didukung oleh keunggulan produksi dan penjualan sumber daya alam minyak dan gas. Sedangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa lebih mengandalkan pengembangan teknologi melalui proyek yang ditujukan untuk kemajuan ekonomi pembangunan mereka. Namun demikian, Rusia juga memiliki keunggulan teknologi, khususnya

peralatan militer. Pengembangan kekuatan militer Rusia pada dasarnya dilakukan untuk mengimbangi dua kekuatan militer yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berbeda dengan Rusia, pengembangan militer Uni Eropa lebih ditekankan pada pengembangan personel militer. Anggaran militer Uni Eropa lebih banyak untuk memberikan tunjangan perbaikan kehidupan anggota militer. Masyarakat awam sering menilai militer Uni Eropa sebagai tandingan bagi Amerika Serikat maupun Rusia. Namun, Uni Eropa tidak memilih jalur militer sebagai jalan untuk menanamkan pengaruhnya kepada dunia.

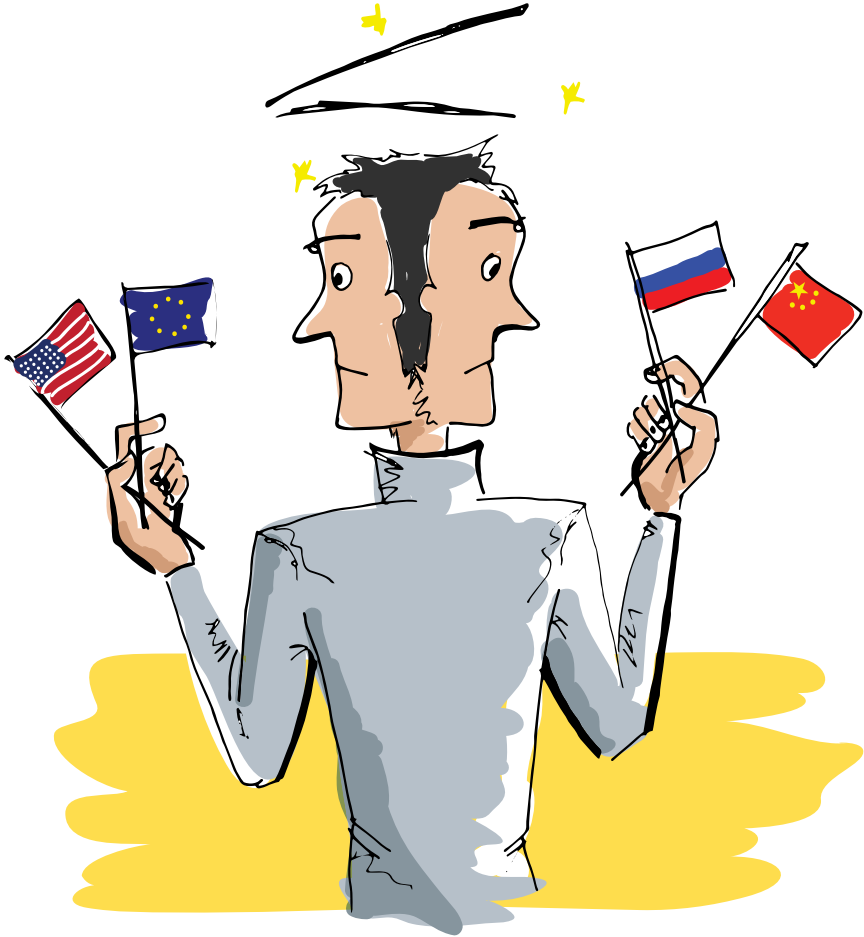
Hutabarat (2006) dalam kajiannya melihat bahwa pergerakan militer negara-negara Eropa ditujukan untuk perdamaian. Masih menurut Hutabarat, Uni Eropa juga lebih banyak memakai pendekatan diplomasi ekonomi dibandingkan pendekatan kekuatan militer. Analisa tersebut sesuai dengan kondisi pada tahun sebelum konflik Timur Tengah terjadi.

Setelah konflik Arab Spring yang dimulai dari konflik kepemimpinan Kolonel Muamar Khadafi di Libya, situasi mulai

menunjukkan perubahan di mana Inggris dan Perancis yang merupakan aliansi NATO menggunakan kekuatan militer untuk mengintervensi pemerintahan Libya. Unjuk kekuatan militer Uni Eropa untuk menurunkan kekuasaan pemerintah Libya bersama Amerika Serikat melunturkan stigma Uni Eropa yang notabene merupakan institusi regional yang lahir untuk memajukan perekonomian anggotanya dan perekonomian dunia melalui pendekatan diplomasi ekonomi.

Sikap Uni Eropa yang mulai menggerakkan militernya menjadi indikasi bagi dunia bahwa negara-negara Uni Eropa tidak konsisten dalam menjalankan misi sebagai *co-optive power* atau menggunakan ekonomi sebagai kekuatan *soft power*-nya. Namun demikian, di sisi yang berbeda, Asia tetap memandang Uni Eropa sebagai institusi regional yang masih menjalankan misi kerjasama ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara Asia yang masih merasakan hal itu.

Hal nyata yang dirasakan Indonesia adalah konsekuensi kelanjutan kerjasama ekonomi melalui *The Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Perjanjian kemitraan ekonomi ini idealnya memberikan manfaat secara timbal balik. Sudah pasti semua negara akan mencari peluang kerjasama yang menghasilkan manfaat mutualisme. Namun, tidak jarang dalam implementasinya masih ditemukan banyak celah yang akhirnya menghasilkan *capability gap*.

Integrasi ekonomi dunia melalui CEPA merupakan hal yang jamak dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Wujud kerjasama ini merupakan langkah Indonesia untuk mengejar keteringgalan perluasan ekonomi yang lebih dulu dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. Kerjasama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa hanya sebagian dari kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia.

Kerjasama tersebut juga termasuk tawaran Amerika Serikat agar Indonesia bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) *Agreement* bersama 11 negara lainnya yaitu Singapura, Brunei Darrusalam, New Zealand, Chile, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Mexico, Canada, dan Jepang.

Tawaran Amerika Serikat kepada Indonesia untuk bergabung di dalam TPP belum menjadi jawaban yang pasti mengingat Indonesia masih banyak memiliki keterbatasan. Meskipun begitu, ada juga pihak yang menilai bahwa Indonesia sudah seharusnya masuk ke dalam TPP untuk menyokong perkembangan ekonomi Indonesia dan mendorong ekonomi lokal untuk

berimprovisasi dan berinovasi. TPP merupakan agenda kerjasama ekonomi yang sangat signifikan. Apalagi Amerika Serikat juga mencoba bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dan menggantikannya dengan perjanjian *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP). Di Uni Eropa, TTIP bahkan mendapat perlawanan oleh sebagian masyarakat Uni Eropa karena dinilai dapat memperburuk kondisi perekonomian negara mereka, meskipun beberapa analisa menyebutkan adanya keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh dari transaksi perdagangan dan investasi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Kontroversi TPP dan TTIP setidaknya menjadi pembelajaran bagi Indonesia yang berada di antara dua kekuatan aliansi ekonomi. Terlebih lagi, di sisi lain Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Rusia yang berbeda sikap dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia sepertinya harus menjadi pemain tunggal yang sekali lagi tidak berpihak kepada siapapun.

Pusat Logistik Berikat Tingkatkan Daya Saing Produk Indonesia

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat Tanggal 31 Desember 2015

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia menjadi negara dengan pangsa pasar terbesar. Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia perlu melakukan efisiensi produksi, agar produk yang bersaing di pasar bebas ASEAN dapat dihasilkan secara lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Untuk itu, perlu dibangun sistem terpadu yang mampu mendekatkan pemasok, penjual, dan pembeli dalam satu tempat. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak produk Indonesia yang berbahan baku impor. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi barang impor untuk disimpan pada Pusat Logistik Berikat (PLB).

PLB, yang merupakan kawasan pabean, adalah lokasi untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Nantinya barang tersebut akan dikeluarkan kembali setelah jangka waktu penimbunan untuk paling lama tiga tahun atau dapat diperpanjang terhadap barang untuk keperluan tertentu. Selama ini, penumpukan barang (*inventory*) berpusat di luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Dengan adanya PLB, diharapkan perusahaan-perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesa, sehingga potensi negara dari sektor perpajakan bertambah. Di samping itu, PLB diharapkan dapat mengurangi beban penimbunan dan menurunkan *dwelling time* di pelabuhan.

Pada 3 Maret 2016, Presiden Joko Widodo telah meresmikan beroperasinya PLB di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta. Ketentuan teknis mengenai PLB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, mulai berlaku sejak 31 Januari 2016. Beberapa hal yang diatur dalam PMK tersebut antara lain mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan PLB, persyaratan dan perizinan pendirian PLB, pemasukan, pengeluaran, dan pemusnahan barang, insentif kepabeanan dan perpajakan, serta kewenangan lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal PLB.

Insentif Kepabeanan dan Perpajakan

Untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi perusahaan yang menyimpan barangnya di PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas dimaksud yaitu, barang yang ditimbun ke dalam PLB berhak mendapat penanguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI), dan/atau diberikan pembebasan cukai.

Sementara itu, bagi pengusaha yang memasukkan barang dari tempat lain dalam daerah pabean berhak mendapatkan insentif tambahan berupa

fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Selain itu, barang yang dimasukkan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor, tidak akan dipungut PPN dan PPNBM.

Syarat dan Kriteria

Penyelenggara PLB merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB. Dalam Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 272/PMK.04/2015 disebutkan untuk mendapat penetapan tempat sebagai PLB dan izin penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Terdapat sejumlah kriteria lokasi dan bangunan yang dipersyaratkan untuk pendirian PLB ini.

Beberapa diantaranya, yaitu perusahaan diwajibkan mempunyai luas lokasi tanah atau bangunan paling kurang 10.000 m², kecuali untuk jenis barang yang penyimpanannya harus ditimbun dalam tangki penimbunan. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan mempunyai batas-batas dan luas jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB.

Ketentuan teknis lainnya adalah penyelenggara PLB harus melengkapi persyaratan pengendalian internal yang baik, telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta *Authorized Economic Operator* (AEO), terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan Badan Usaha Milik Negara, atau memiliki lokasi tanah dan atau bangunan minimal 10.000 m². Apabila persyaratan telah lengkap, Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 10 hari kerja.

Pengawasan

Untuk memastikan kegiatan yang dilakukan dalam kawasan PLB sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan terkait PLB. Sistem pengawasan dilakukan berdasarkan perhitungan manajemen risiko. Hasil dari pengawasan tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar melakukan evaluasi atas izin penyelenggaraan kegiatan PLB, termasuk pelaku usaha di dalamnya. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat pengawasan.

Penutup

Sehubungan dengan upaya meningkatkan ekspor di era MEA, Indonesia berhadapan dengan negara yang sudah memiliki perjanjian dengan negara lain baik di tingkatan regional maupun global yang memberikan berbagai insentif fiskal. Berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah diharapkan dapat menekan biaya produksi. Selain insentif, keberadaan PLB juga diharapkan bisa menekan biaya logistik, yang mencapai sekitar 30 persen dari biaya produksi.

Selain itu, dipersyaratkannya penyelenggara PLB sebagai perusahaan yang telah terdaftar dalam BEI adalah upaya untuk menguatkan pengelolaan perusahaan secara transparan. Penyelenggara PLB dengan reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan asing untuk bersedia mengirimkan barangnya langsung ke Indonesia, tanpa perlu singgah di PLB Malaysia atau Singapura. Dengan banyaknya perusahaan yang menjadi PLB, diharapkan Indonesia bisa menjadi pusat logistik di kawasan Asia Tenggara.

Teks Budi Sulistyoy

Menemukan Ruang Inovasi di Birokrasi

Hidup memang penuh pilihan. Guindra menolak kesempatan bekerja di kantor akuntan ternama. Ia memilih mengabdikan kepada negara, berharap bisa mengubah masa depan Indonesia melalui birokrasi.

“Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia,” petikan kalimat dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu terngiang di tengah wawancara Media Keuangan dengan Guindra Pramudi Nugraha. Gaya bicaranya yang tenang namun lugas menyiratkan betapa ia ingin bekerja dan berkontribusi lebih baik. Guindra, panggilan akrabnya, menyadari bahwa mengabdikan di kantor pemerintah berbeda saat ia bekerja di sektor swasta. Namun satu hal yang terus ia yakini, ketika memutuskan menjadi abdi negara, ia akan terus berusaha demi kemajuan organisasi.

Akuntan yang memilih menjadi PNS

Pria kelahiran Malang, 1 Agustus 1989 ini tak pernah menyesali keputusannya mengikuti seleksi Calon Pegawai Sipil Kementerian Keuangan tahun 2012 lalu. Lulusan terbaik Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya tahun 2010 ini juga menolak direkomendasikan bekerja di salah satu kantor akuntan publik bergengsi di Jakarta. “Kementerian Keuangan memiliki reputasi bagus. Kalau semua orang yang lebih pintar dari saya bekerja di sektor swasta, nanti bagaimana kita memperbaiki kualitas pemerintah,” tutur pelahap karya sastra Pramoedya Ananta Toer ini.

“Saya pernah melakukan pekerjaan dari yang paling remeh sampai paling sulit. Saat bekerja sebagai pegawai negeri sipil, saya kerjakan itu semua. Saya tidak berekspektasi pekerjaan saya harus begini begitu, harus terlihat pintar atau sibuk, semuanya saya kerjakan saja,” jelasnya. Kalaupun ada kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya, salah satu inisiator acara Ekspatriat Inspektorat Jenderal dan Itjen Expo ini memilih untuk memperbaiki atau menciptakan hal baru.

“Saya senang saat masuk ke dunia pemerintahan, banyak sekali *room of improvement*,” tuturnya sembari tersenyum. Begitulah perspektif Guindra saat memandang profesinya saat ini. Alih-alih hanya mengeluhkan apa yang tidak kita dapat atau menyalahkan kondisi, semangat pegawai yang memandang profesinya dengan bingkai positif sangatlah dibutuhkan. Semangat itu yang membuat Guindra bekerja dengan visi misi, bagaimana ia bisa memberikan perubahan positif bagi institusi.

Tak berlebihan bila menjuluki pria pengagum Steve Jobs ini sebagai pegawai serba bisa. Guindra menekuni dunia desain saat aktif di AIESEC, sebuah organisasi internasional bagi anak muda yang berfokus pada pengembangan kemampuan kepemimpinan. Saat menjadi *Vice President of Information Management* AIESEC, Guindra sering berbicara tentang bagaimana menciptakan produk fisik maupun visual. Kini ia juga dipercaya sebagai salah satu tim *layout* Majalah Auditoria Inspektorat Jenderal.

“Desain bukanlah hal yang dipandang sebelah mata. Dalam suatu produk, desain sangat penting. *Designer is a problem solver*,” tutur pria yang juga mengagumi Jonathan Ive ini tersenyum. Jonathan Ive atau yang lebih dikenal dengan Jony Ive adalah seorang desainer andal di balik keunikan produk-produk Apple, salah satu perusahaan teknologi komunikasi terbesar di dunia.

Guindra yang dinobatkan sebagai *Best Vice President of Information Management* dari AIESEC Indonesia ini memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang mumpuni. Hal ini secara tidak langsung ia peroleh dari keaktifannya berorganisasi. Dalam beberapa kali konferensi AIESEC di tingkat nasional dan internasional, ia diharuskan melakukan presentasikan isu tertentu. Kepiawaiannya berbicara ini mendapat sambutan positif dari rekan kerja dan atasannya di kantor. Ia seringkali diminta menjadi *master of ceremony* di berbagai acara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Menuntut ilmu sampai Negeri Bambu

Selalu ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Kalimat ini cocok untuk menggambarkan pribadi Guindra. Saat

01 Foto bersama saat mengikuti training di Shanghai.

02 Guindra sering berbicara tentang bagaimana menciptakan produk fisik maupun visual.

03 Guindra bersama keluarga.

Foto Dok. Pribadi



mendengar ada penawaran *training* mengenai pengembangan infrastruktur dari Korea Development Institute, kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan bahasa Inggris melalui *video conference*. Pertama, ia diminta memberikan *feedback* dalam bentuk *paper* dari *video conference*. Setelah melakukan tugas *video conference* kedua, ia harus mempresentasikan *country report*, yaitu kumpulan kasus *Public-Private Partnership* (Kemitraan Publik-Swasta) di Indonesia. Seleksi tahap akhir ini dilakukan di hadapan perwakilan Korea Development Institute. Berdasarkan penilaian keaktifan dan kualitas *paper*, akhirnya Guindra terpilih mengikuti *training* yang diselenggarakan pada 30 November–4 Desember 2015 di Shanghai, China. Guindra menjadi

satu-satunya peserta dari Inspektorat Jenderal. Saat ini Guindra sedang memperjuangkan mimpi menjadi seorang ekonom. “Pengetahuan saya saat ini hanya sebatas anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal. Saya ingin memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara luas. Saya ingin menjadi ekonom atau auditor yang berskala global, tidak hanya di Indonesia saja,” katanya bersemangat. Kehausan Guindra akan ilmu pengetahuan inilah yang terus membuatnya tak pernah berhenti bercita-cita. Tak heran bila ia juga sangat mengidolakan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. “Menurut saya, orang *pinter* itu seperti pak Chatib Basri. Beliau tidak perlu menggunakan bahasa yang sulit

untuk menyampaikan sesuatu. Beliau bisa menjelaskan tentang ekonomi dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam. *Keren banget*,” ujarnya. Akhir pekan menjadi saat-saat yang paling dinantikan oleh suami dari Rima Dewi Pradita ini. Saat ini ia menjalani *long distance relationship* dengan putri kesayangannya, Jenna Narella Guindra yang berumur delapan bulan. Guindra dan istri sedang mempersiapkan rencana untuk memboyong Jenna, nama panggilan putrinya, ke Jakarta. “Anak adalah semangat terbesar saya. Apa yang saya lakukan sekarang adalah bentuk penyaluran semangat, siapa tahu bisa menginspirasi saat dewasa nanti,” tuturnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Manajemen Diri Melalui Sabar



Foto
Langgeng Wahyu

Fenomena kekerasan yang akhir-akhir ini menghiasi wajah media kita, menjadi sinyal kurangnya manajemen diri bernama kesabaran. Padahal, setiap fase dalam hidup kita menuntut adanya kesabaran. Orang-orang besar dalam sejarah membuktikan, bahwa kesabaran mereka jadikan kendaraan yang mampu meghantarkan pada kesuksesan. Sebut saja Sir Issac Newton, Thomas Alfa Eddisson, Abu Qosim Az-Zahrawi, dan Ibn al-Haitham. Mereka, melalui penemuan besarnya, berhasil memberikan sumbangsih luar biasa dalam teknologi modern lewat kesabaran.

Jika demikian, sungguh sabar menjadi begitu luas maknanya. Ia jelas bukan sekadar kepasrahan hati dalam menerima tiap episode hidup. Kesabaran menjadi sebuah keniscayaan. Layaknya nutrisi penting yang harus ada. Oleh karena itu, bolehlah kiranya kita membagi kesabaran dalam empat kategori.

Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kedua, sabar untuk tidak melakukan hal yang buruk di mata Tuhan dan sesama manusia. Ketiga, sabar dalam menaati aturan hidup beragama dan bermasyarakat. Keempat, sabar dalam usaha mencapai kesuksesan hidup yang mulia.

Sabar terhadap musibah yang menimpa adalah jenis kesabaran yang rasanya telah kita ketahui maknanya. Bahwa memperoleh hikmah atas segala hal yang hadir adalah upaya yang bisa mewujudkan jenis kesabaran yang satu ini. Kesabaran model kedua dan ketiga layaknya pagar dalam melindungi rumah. Dia menjaga agar fase besar bernama kehidupan dapat berjalan secara berkesinambungan, harmonis dan nyaman. Sebab setiap orang memiliki kepentingan yang tak selayaknya saling berbenturan dan berakhir pada kekerasan.

Terakhir, kesabaran yang diiringi dengan kegigihan untuk menjadikan hidup lebih berharga. Ada tujuan mulia yang hendak dicapai. Silahkan menakar sendiri tentang apa itu sukses dan bagaimana menjadi pribadi mulia versi Anda.

Pengertian sabar yang lebih komprehensif kini, membawa kita pada satu pemahaman baru. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam lingkup kecil yang bersifat personal, maupun dalam lingkup yang lebih besar bernama masyarakat, sudah sepantasnya megajak kita menengok lebih dalam dan bertanya. Sudahkah manajemen diri bernama kesabaran itu kita hadirkan?

Teks Farida Rosadi



Judul:
Rudy: Kisah Muda Sang Visioner
Pengarang:
Gina S. Noer
Penerbit:
Bentang Pustaka
Kota Terbit:
Bandung
Tahun Terbit:
Oktober 2015
Deskripsi Fisik:
280 halaman
ISBN:
9786022911111

Buku ini merupakan kumpulan kisah yang diceritakan Bacharudin Jusuf Habibie sewaktu muda kepada penulis Gina S.Noer. Membaca buku ini akan membuat Anda semakin bangga sebagai orang Indonesia. Itulah yang dirasakan Rudy (panggilan Habibie saat muda) yang selalu bangga membawa nama Indonesia saat bekerja ataupun melanjutkan studi di negeri orang. Tak main-main, proses penyusunan alur buku ini diawali riset mendalam dari sang penulis. Gina benar-benar ingin menyelami kehidupan Rudy muda, mulai dari wawancara dengan tokoh, studi literatur, hingga riset lokasi tempat Rudy tumbuh besar dan dewasa. Semuanya begitu detail. Pembaca seolah-olah diajak untuk ikut merasakan sejarah di era awal kemerdekaan. Saat itu, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno gencar menekankan pentingnya kemandirian sarana perhubungan di Indonesia. Untuk itu, sangat dibutuhkan teknisi dan sarjana yang memiliki keahlian di bidang perhubungan laut dan udara.

Melanjutkan studi dan hidup di negeri orang tanpa beasiswa membuat Rudy harus menghemat biaya pengeluaran. Di saat semua teman-temannya mengambil kerja praktikum untuk mendapatkan gaji tinggi dan pengalaman kerja, Rudy justru

mengikuti ujian *Studienkollegs*. Bila lolos mengikuti ujian ini, Rudy akan menghemat waktu satu tahun, tak perlu menjalani satu tahun persiapan di *Studienkollegs*. Pasalnya, masa persiapan menuju ujian tersebut hanya tinggal satu minggu. Ia harus bersaing bersama 2000 peserta ujian lain agar bisa masuk Universitas RWTH-Aachen. Rudy menjadi satu-satunya calon mahasiswa dari Indonesia yang mengikuti ujian tersebut. Hasil ujian Rudy ternyata sangat gemilang, ia mendapatkan nilai hampir 10 yang membuatnya terkenal sebagai mahasiswa Indonesia yang cerdas.

Sampul buku ini dominan dengan warna biru dengan latar belakang desain pesawat IPTN N-250 dan Pesawat Casa/ IPTN CN-235, selaras dengan Rudy sebagai tokoh utama dalam biografi ini. Maka tidak salah apabila buku ini didedikasikan kepada setiap orang tua yang terus memberikan usaha terbaiknya mendidik anak mereka agar tumbuh berguna demi bangsa. Begitu juga kepada para generasi muda, mereka harus tekun berusaha dan percaya bahwa bangsa ini selalu punya harapan. Ke depan, film Rudy Habibie berencana akan tayang di layar lebar sekitar bulan Juli 2016. Film dan bukunya disebut juga sebagai sekuel dari cerita Habibie dan Ainun yang menuai respon positif dari masyarakat pada tahun 2012 lalu.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu
 Perpustakaan Kementerian Keuangan
 @kemenkeulib
www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 131 Pintu Cahaya dari Timur
A. Fuadi
- Menulis dan Berpikir Kreatif
Ayu Utami
- Garut: Swiss Van Java
Edi Dimiyati
- Foodie and the City: Petualangan Kuliner Jelajah Rasa
Nadia Mulya
- Ayah
Andrea Hirata

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- TOEIC Practice Exams
Lin Loughheed
- The 7th Edition of State and Local Government
Ann O'M. Bowman
- Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner
Gina S. Noer
- The New Digital Age
Eris Schmidt
- The Everything Store: Jeff Bezos dan Era Amazon
Brad Stone

Mencicip Sajian Khas RM Surya

“Udah lama nggak ke sini. Si adik udah besar?” Sapa si Uda sambil menyajikan piring-piring kecil bergambar bunga yang mengingatkan saya akan dekade yang telah lampau.

Saya pun mengangguk sopan. Teringat terakhir kali berkunjung di sini lebih dari 2 tahun lalu, ketika anak sulung saya belum juga genap setahun. Terselip rasa hangat di dada karena si Uda masih mengenali meskipun saya bukanlah pengunjung rutin di Rumah Makan (RM) Surya ini.

Rumah makan yang berlokasi di Benhil dan berdiri sejak tahun 70-an ini cukup termasyur dan punya pelanggan tetap. RM ini juga merupakan cabang dari RM Surya Angkasa yang terletak di daerah Tubing, sekitar setengah jam perjalanan dari bandara Minangkabau, Padang.

Beragam menu tersedia, namun karena keterbatasan meja, tidak semua dapat dihidangkan. Mulai dari yang standar seperti ayam pop, rendang, gulai tunjang, ikan bilis, kerupuk kulit gulai, kepala ikan kakap sampai gulai kurma yang ada tiap hari jumat.

Favorit saya adalah terong petai dengan sambal lado, juga sop daging, dan ayam gulai. Sementara hidangan yang melegenda adalah dendeng batokok, juga dengan sambal lado.

Tidak berlebihan rasanya menyebut sambal lado di RM Surya begitu istimewa. Gerusan cabe hijau kasar yang berbalut minyak jernih sungguh membersihkan air liur. Paling pas dinikmati bersama nasi hangat dan taburan kulit petai matang nan renyah.

Tak banyak orang yang tahu bahwa RM Surya punya sop daging paling memikat se-Jakarta. Kaldunya gurih, berkat daging yang dimasak lama sampai empuk. Warnanya agak keruh, dengan sedikit kilauan minyak bekas menumis bumbu. Sayurannya pun tidak pelit diberikan. Kentang, wortel, tomat, serta daun bawang melimpah ruah, sampai kuah mencapai bibir atas mangkuk. Sayang untuk dilewatkan.

Umumnya, nasi jenis pera dengan amilosa tinggi yang dihidangkan di RM Padang. Namun, nasi di RM Surya berasal dari beras setra ramos. Uniknya, nasi tersebut juga tidak pulen. Teksturnya keras di luar, namun lembut di dalam, berpadu serasi dengan kuah kental dan bumbu santan. Membuat saya tak ragu-ragu untuk menambah seporsi lagi.

Untuk mengimbangi menu berat, tersedia sayuran seperti gulai kacang panjang dan lalapan yang terdiri dari rebusan terong, buncis, dan daun singkong. Jika sedang beruntung, kita juga bisa menikmati es kopyor segar sesudah

lidah digoyang bumbu pedas yang bikin ketagihan. Jika ingin ‘ngemil’ berat, juga tersedia sajian sepinggan seperti mie kuah, nasi goreng, dan sate, tentunya ala Padang yang penuh rempah dan spicy.

Meskipun buka dari pukul 09.00 sampai 20.00, namun jika berkunjung di atas jam makan siang, beberapa lauk kemungkinan sudah tandas. Terlebih lagi di akhir pekan. Tak heran jika omzet RM Surya mencapai Rp30 juta per harinya.

Jangan harap mendapati RM Surya buka pada bulan Ramadhan. Sang pemilik punya aturan yang tak bisa diganggu gugat. Sebulan penuh, warung ditutup agar karyawan fokus beribadah. Baru dibuka lagi pada hari kedua Lebaran. Karyawan pun digaji dengan sistem bagi hasil per 3 bulan. Tingkat kepuasan karyawan cukup tinggi sehingga *turn over* sangat kecil. Banyak yang bekerja sejak muda sampai wafat.

Tidak perlu takut kantong jadi bolong karena harga makanannya sangat terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek sekitar Rp 50 ribu, bisa makan berdua, masing-masing dengan sepiring nasi plus satu lauk, serta tambahan seporsi nasi dan pisang.

Teks Citra Handayani,
Pegawai Sekretariat Jenderal

RM Surya
Jl. Bendungan Hilir Raya
No. 15, Jakarta Pusat
021-5731474
081310032485

Foto
Arfindo Briyan





Pilihan Hidup Addie

Bagi konduktor Twilite Orchestra, Addie MS, kalimat bijak yang pernah dilontarkan oleh Albert Einstein “Cobalah untuk tidak hanya menjadi orang yang sukses, tetapi jadilah orang yang memiliki nilai” mempunyai arti mendalam. Keinginan untuk menjadi *a man with value* adalah faktor yang mendorong pria kelahiran Jakarta, 7 Oktober 1959 itu merintis orkestra pada tahun 1991. Saat itu, karier Addie sebagai musisi dan produser sebenarnya sudah cukup baik. “Saya menolak banyak tawaran untuk musik komersial karena ingin mendedikasikan diri pada musik simfoni,” kata Addie yang ditemui Media Keuangan di Jakarta tempo hari. Awalnya, Memes, sang istri tidak senang dengan pilihan pria yang sempat mengikuti kursus musik di Amerika Serikat itu. “Saya cuma mendengarkan dan membiarkannya. Dia tidak tahu kalau saya sudah menabung, sehingga bisa melakukan apa yang saya suka,” lanjut Addie.

Orang-orang di sekitar Addie semula sempat menertawakan keputusannya mendirikan orkestra. “Mereka bilang, ‘paling cuma setahun dua tahun’. Tapi *Alhamdulillah*, Twilite Orchestra akan merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun ini,” tutur ayah musisi Kevin Aprilio itu.

Foto
Instagram
@addiems999

Pandangan orang terhadap pilihan hidup Addie tak hanya ketika merintis orkestra. Yang lebih menyakitkan, dia mengenang, dulu ada seorang jurnalis dan kritikus musik yang tidak pernah puas dengan hasil pekerjaannya. Apapun yang Addie lakukan selalu salah. “Dia membandingkan saya dengan legenda maestro Eropa. Tentu saja tidak sebanding. Twilite Orchestra pada waktu itu adalah satu di antara sedikit orkestra yang ada. Kami masih belajar,” ujarnya.

Suatu hari, Addie mengundang kritikus itu ke rumahnya dan bertanya apa yang harus dilakukan agar bisa seperti sang maestro. Permintaan Addie agar si kritikus mengajarnya juga tidak pernah dijawab. “Ya sudah, saya tidak ingin dia mematahkan semangat saya. Tidak peduli seberapa bagus dirimu, selalu ada yang tidak suka,” kata Addie lagi.

Dari sekian banyak pengalaman hidup yang berperan membentuk karier Addie sekarang, pertunjukkan di Munich, Jerman, puluhan tahun silam termasuk pengalaman berharga yang melekat di benaknya. Ketika Twilite Orchestra tampil, ada seorang penonton yang mengejek sebelum konser dimulai. “Oh orang Indonesia, mau main apa, gamelan?” kata Addie menirukan cibiran orang tersebut. Namun, tanpa disangka, setelah konser, sang penonton justru datang menghampiri Addie dan memberikan selamat. “Saya tidak menyangka orang Indonesia bisa main musik orkestra,” kata Addie kembali mengenang respons penonton itu.

Kini Addie sudah membuktikan bahwa pilihan hidupnya dulu tak salah. Berbagai penghargaan telah diraih dan berbagai panggung musik lintas negara sudah didatangi. Kepada pemerintah, konduktor yang baru saja menggelar konser orkestra soundtrack film-film Hollywood seperti Harry Potter dan Star Wars itu berharap adanya perhatian yang lebih serius terhadap perkembangan musik orkestra di tanah air.

Teks Dwinanda Ardhi



cara mudah bayar pajak.



mulai
1 JAN

2016

pembayaran
pajak wajib
menggunakan

e-billing



Register
sse.pajak.go.id atau
via HP : *141*500#



Cetak
Kode Billing



Bayar
Pajak Anda



1500200



www.pajak.go.id

Channel
Bayar

ATM, MiniATM, Internet Banking
Mobile Banking, Teller, Pos



SELAMAT HARI NELAYAN NASIONAL
6 APRIL 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA